

No. 174 Agustus - September 2020

www.baktinews.bakti.or.id

BaKTI News

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MENYAMBUT SINERGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT**

PENGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK ADVOKASI

**KISAH ABAS & KOMUNTO,
NELAYAN TOMIA YANG MENJAGA LAUT
DENGAN HATI**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews****

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews****

Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI!News

Agustus - September 2020

No. 174

- 1** Menyambut Sinergi Perencanaan Pembangunan Papua dan Papua Barat
Oleh **HALIA ASRIANY**
- 6** Kiprah Perempuan Respons COVID-19
Oleh **LUSIA PALULUNGAN**
- 9** Penggunaan Media Sosial untuk Advokasi
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 13** Potret Pemberdayaan Perempuan Pedalaman Bahonglangi Bagian II (Selesai)
Oleh **WA ODE SURYA DARMA & A. APPI PATONGAI**
- 17** Jejak Peradaban Perempuan Adonara Dulu dan Sekarang
Oleh **EDUARDUS BAYO SILI**
- 22** Sekarang Kita Punya Muara Informasi tentang BANGGA Papua
Oleh **LUNA VIDYA & SYAIFULLAH**
- 25** Kisah Abas & Komunto, Nelayan Tomia yang Menjaga Laut dengan Hati
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 31** Respons Daerah Untuk Tatanan Baru: Dampak COVID-19 di Bone, Sulawesi Selatan
Oleh **TIM PENELITI TULODO**
- 34** Menghadapi Normal Baru, Puskesmas Sebenarnya Bisa Lebih Perkasa Memberdayakan Masyarakat
Oleh **MARYA YENITA SITOANG & HADIYANTO**
- 37** Mengharap Kenormalan Baru dan Kerentanan di Masyarakat
Oleh **NOPIRI WAHYUNI**
- 40** Cerita Menginspirasi
- 41** Batukarinfo.com

■ Foto Cover :
Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI





Menyambut Sinergi Perencanaan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Oleh **HALIA ASRIYANI**

Bagaimana melakukan perencanaan pembangunan dengan baik? Pertanyaan ini mungkin seringkali terlintas di benak kita. Perencanaan pembangunan yang baik, salah satunya adalah menjawab kebutuhan masyarakat. Lantas bagaimana menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat?



Rapat Dewan Pendidik SDN 2 Demta Jayapura
menghadirkan BAMUSKAM dan Kampung
Foto : Dok. Program LANDASAN/Yayasan BaKTI

dihasilkan lebih sering tidak mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat. Begitu pula dengan perencanaan kampung yang tidak melibatkan Puskesmas dan sekolah sehingga tidak dapat menjawab dengan tepat kebutuhan kesehatan dan pendidikan masyarakat kampung.

Ada banyak permasalahan yang dapat dijawab dan diatasi, jika kampung dan unit layanan mau melakukannya bersama-sama. Demikianlah harapan dari program sinergi perencanaan yang digagas oleh KOMPAK-LANDASAN Fase II. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat Papua dan Papua Barat terhadap layanan dasar (kesehatan dan pendidikan) yang berkualitas.

Perjalanan Panjang Program Sinergi Perencanaan

Program sinergi perencanaan ini melalui proses yang panjang hingga benar-benar dapat dipraktikkan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah. Berangkat dari penyusunan konsep dan pembangunan kesepahaman internal tentang sinergi perencanaan yang dimulai sejak awal 2019. Kemudian dilanjutkan dengan Roadshow dan Konsultasi Panduan Sinergi Perencanaan untuk memperkenalkan dan menggali masukan dari pemerintah daerah mengenai model sinergi perencanaan yang akan dikembangkan di delapan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Training of Trainer Sinergi Perencanaan pun menjadi tahap berikutnya untuk menyiapkan fasilitator kabupaten dalam mengawal proses sinergi perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah. ToT ini sendiri diawali dengan mempersiapkan fasilitator provinsi untuk melatih fasilitator kabupaten tersebut. Dengan tersedianya fasilitator kabupaten yang telah siap mengawal jalannya sinergi perencanaan

Program sinergi perencanaan merupakan sebuah upaya untuk menciptakan pembangunan Papua dan Papua Barat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Caranya dengan membuat perencanaan yang partisipatif dan melibatkan layanan dasar kesehatan dan pendidikan (Puskesmas dan Sekolah Dasar) di dalamnya. Selama ini, baik kampung maupun layanan dasar membuat perencanaannya sendiri-sendiri. Bahkan seringkali tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. Akibatnya perencanaan yang



di kabupaten masing-masing, *workshop* sinergi perencanaan pun dilakukan.

Demikianlah proses persiapan hingga akhirnya *workshop* sinergi perencanaan kampung, Puskesmas dan sekolah bisa dilakukan pada akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 di delapan kabupaten yaitu Jayapura, Nabire, Asmat dan Boven Digoel untuk Provinsi Papua. Sementara untuk Provinsi Papua Barat dilakukan di Manokwari Selatan, Sorong, Kaimana dan Fakfak. *Workshop* sinergi perencanaan ini dikerjakan dengan sistem *learning by doing*. Prosesnya menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan penyusunan perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah di masing-masing wilayah sasaran program.

Setelah *workshop* sinergi perencanaan berhasil dijalankan di delapan kabupaten, perjalanan belum berhenti sampai di situ. Masih ada tahap berikutnya yaitu mendampingi proses penyelesaian dokumen perencanaan kampung, Puskesmas dan sekolah. *Workshop* sinergi perencanaan ini melahirkan usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK); Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

Puskesmas; Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah. Semua dokumen perencanaan ini akan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pembangunan di wilayah kampung masing-masing. Juga kegiatan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat oleh Puskesmas dan sekolah.

Proses pendampingan penyelesaian dokumen di seluruh kampung kini telah memasuki tahap finalisasi. Didampingi oleh Tim KOMPAK-LANDASAN melalui koordinator kabupaten dan koordinator distrik bersama dengan fasilitator kabupaten masing-masing, para tim perencana kampung, Puskesmas dan sekolah terus bekerja menyelesaikan dokumen perencanaan mereka. Di dalam perencanaan tersebut akan memuat program kerja yang bersinergi antara kampung, Puskesmas dan sekolah dasar di mana sebelumnya telah disusun bersama-sama dalam *workshop*.

Sinergi Perencanaan adalah Pengalaman Baru bagi Kampung

Bagi sebagian besar kampung, menyusun dokumen perencanaan sendiri adalah hal baru. Namun melalui program sinergi perencanaan ini,



Rapat Dewan Pendidik untuk menyusun RKT SD YPK Tarfia-Kamdera, Jayapura (kiri). Pendampingan Penyelesaian Dokumen RKT SD - RKS SD Inpres Tanama, Fakfak (kanan atas). Penyusunan Dokumen RKT SD YPK Muris Yakore, Distrik Demta, Jayapura (kanan bawah)

Foto : Dok. Program LANDASAN/Yayasan BaKTI



Blasius Kilmas, Fasilitator Kabupaten Kaimana untuk sektor pendidikan pun sangat mengapresiasi pencapaian dari tim perencanaan sekolah di SD YPK Sisir I, Kampung Marsi Kabupaten Kaimana. “RKT dan RKS adalah hal baru bagi SD di Kampung Marsi ini, namun bisa sampai sejauh ini sangat luar biasa sekali. Teman-teman di sekolah benar-benar belajar banyak dari program ini,” ungkap Blasius.

Hal senada diungkap oleh Natalia Mambraku, Fasilitator Kabupaten Manokwari Selatan untuk sektor kesehatan. Menurutnya kegiatan ini sangat perlu untuk direplikasi di daerah lain. “Kami sangat terima kasih sehingga teman-teman Puskesmas bisa menyusun RUK dan RPK dengan bersinergi bersama kampung. Model perencanaan ini baiknya dilakukan di seluruh wilayah Manokwari Selatan supaya menghasilkan perencanaan yang baik,” pungkasnya.

kampung dapat menyusun perencanaannya secara mandiri dan melakukan perencanaan secara bersinergi dengan Puskesmas dan sekolah dasar. Sejumlah 8 Puskesmas dan 12 sekolah dasar di Papua dan Papua Barat pun menjadi bagian dari program sinergi perencanaan ini.

Alfred Yakore, Kepala Kampung Yakore, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura menyampaikan terima kasih atas program sinergi perencanaan di kampungnya. “Kami berterima kasih pada tim LANDASAN sudah membantu kami menyusun perencanaan. Kami sudah bertahun-tahun bekerja di pemerintahan kampung tapi baru pertama kali kami belajar melakukan ini dan kami berhasil,” tutur Alfred.

Keberadaan fasilitator kabupaten pun menjadi hal yang sangat membantu jalannya proses pendampingan ini, “Kami tidak begitu banyak kendala karena ada fasilitator kabupaten yang ikut mendampingi dan membantu proses ini berjalan baik,” papar Roni Jaisona, Kepala Kampung Marsi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana. “Banyak terima kasih pada tim LANDASAN atas banyak pelajaran bermanfaat, akhirnya kami tahu bagaimana menyusun perencanaan sesuai potensi dan kebutuhan di kampung dari semua sektor,” tambahnya lagi.

Menuju Sinergi Perencanaan Papua dan Papua Barat

Sejumlah 12 kampung telah didampingi menyusun perencanaan yang bersinergi dari delapan kabupaten di Papua dan Papua Barat. Salah satu kabupaten yang telah menyelesaikan perencanaannya dan menggelar musyawarah penetapan RPJM dan RKP kampung adalah Kabupaten Manokwari Selatan, tepatnya di Kampung Waroser, Distrik Momiwaren. Kampung Waroser kini menjadi kampung pertama di Kabupaten Manokwari Selatan yang membuat dokumen perencanaannya sendiri secara bersinergi dengan layanan dasar kesehatan dan pendidikan (Puskesmas dan sekolah dasar). Untuk selanjutnya 11 kampung lainnya di Papua dan Papua Barat akan menjadi kampung pertama yang memiliki dokumen



perencanaan yang bersinergi antara kampung, Puskesmas dan sekolah di wilayah masing-masing menyusul Kampung Waroser di Manokwari Selatan.

Program sinergi perencanaan ini telah melahirkan cara pandang baru dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang akan mendorong kualitas layanan dasar kesehatan dan pendidikan sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setelah memahami proses sinergi perencanaan yang dilakukan, sejumlah kabupaten pun tengah menyiapkan replikasi untuk program sinergi perencanaan ini. Salah satunya di Kabupaten Fakfak yang menyatakan siap melakukan replikasi program sinergi perencanaan di 17 distrik wilayahnya.

Mendukung replikasi program, rangkaian produk pengetahuan sinergi perencanaan untuk kampung, Puskesmas dan sekolah kini tengah disiapkan oleh tim KOMPAK-LANDASAN. Rangkaian produk pengetahuan ini akan berisi

Pendampingan Penyelesaian dokumen perencanaan
Kampung Kamdera, Distrik Demta, Jayapura
Foto : Dok. Program LANDASAN/Yayasan BaKTI

ringkasan esensi konsep dan panduan mekanisme untuk mengimplementasikan model sinergi perencanaan yang digagas dan dikembangkan oleh Tim KOMPAK-LANDASAN. Juga akan ada seri cerita tentang rangkaian proses membangun sinergi perencanaan yang telah dijalankan oleh Tim KOMPAK-LANDASAN. Seri panduan sinergi perencanaan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui ataupun hendak membangun perencanaan yang bersinergi di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Kiprah Perempuan Respons COVID-19

"Wanita adalah seorang pemimpin dimanapun Anda melihatnya. Mulai dari seorang CEO dari perusahaan yang masuk ke daftar Fortune 500 maupun ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anaknya dan melakukan pekerjaan rumah. Negara kita dibangun oleh wanita-wanita yang kuat dan akan terus bertarung untuk melawan stereotip." **Nancy Pelosi**

Oleh **LUSIA PALULUNGAN**

Pandemi COVID-19

Sejak 30 Januari 2020 Wabah COVID-19 telah ditetapkan secara resmi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (*Public Health Emergency of International Concern*, PHEIC) dan dinyatakan sebagai Pandemi Global sejak tanggal 11 Maret 2020. Menyusul kemudian, pemerintah Indonesia menyatakannya sebagai darurat nasional non-alam pada tanggal 14 Maret 2020. Selanjutnya di tingkat daerah khususnya Provinsi Sulawesi Selatan juga mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 16 Maret 2020.

Dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban negara terkait pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah pusat dan daerah. Kewajiban negara dalam hal ini pemerintah, harus dioptimalkan termasuk alokasi "sumber daya maksimum yang tersedia", harus dimanfaatkan secara progresif untuk mencegah dan menanggulangi semakin meluasnya pandemi COVID-19.

Tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak atas kesehatan telah diatur dalam berbagai aturan hukum baik internasional maupun nasional, mengatur tanggung jawab pemerintah untuk menjamin pengakuan, pemenuhan dan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada pertengahan April 2020 mencatat data dari kabupaten/kota totalnya 9.726 orang pekerja se-Sulawesi Selatan yang terimbas wabah COVID-19. Ribuan pekerja tersebut terdiri atas pekerja terkena PHK, dirumahkan dan dirumahkan dengan sebagian upah.

perlindungan hak atas kesehatan setiap orang di wilayah negara Republik Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mencakup jaminan ketersediaan fasilitas layanan barang dan jasa serta informasi kesehatan yang harus memenuhi prinsip-prinsip: aksesibilitas yakni fasilitas, barang, dan jasa layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua orang. Penerimaan, yaitu penghormatan terhadap etika medis, kesesuaian budaya, dan kepekaan terhadap gender. Kualitas, yaitu fasilitas barang, dan jasa harus disetujui secara ilmiah dan medis yang merupakan komponen kunci dari cakupan kesehatan universal.

Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait (Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan) termasuk kebutuhan khusus kelompok rentan antara lain anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.

Dampak COVID-19

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan pada pertengahan April 2020 mencatat data dari kabupaten/kota totalnya 9.726 orang pekerja se-Sulawesi Selatan yang terimbas wabah COVID-19. Ribuan pekerja tersebut terdiri atas pekerja terkena PHK, dirumahkan dan dirumahkan dengan sebagian upah. Kabupaten/kota tersebut di antaranya

Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Bulukumba, Sinjai, Wajo, Pangkep, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja dan Toraja Utara akibatnya terjadi perlambatan bisnis dan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Data tersebut masih bersifat sementara karena Dinas Tenaga Kerja masih menunggu *updating* data dari kabupaten/kota lainnya. Kebijakan merumahkan pekerja dan PHK pekerja berasal dari 130 perusahaan yang tersebar di 11 kabupaten kota di Sulsel dengan sektor usaha yang paling terdampak adalah perusahaan perhotelan dan pariwisata. Selain itu perusahaan travel, rumah makan, dan beberapa sektor usaha lainnya.

Tanggung Jawab Sosial

Ketersediaan data merupakan salah satu tantangan terbesar di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Data riil yang dimiliki pemerintah adalah data tenaga kerja yang bekerja di sektor formal yang di PHK, diberhentikan sementara atau dirumahkan. Itu pun masih belum sepenuhnya terdata. Apalagi data masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti pedagang di pasar, pedagang keliling, tukang becak, pedagang asongan, tukang parkir, tukang ojek, sopir, pengusaha kecil, pekerja rumah tangga dan lain sebagainya.

Dampak dari data yang kurang akurat tersebut, menyebabkan program bantuan pemerintah tidak merata. Ada banyak fakta lapangan menunjukkan bahwa penyaluran bantuan seperti sembako masih bermasalah pada data penerima. Ada penerima yang menerima double. Ada yang menerima tapi sebenarnya tidak memenuhi syarat atau kriteria penerima bahkan ada pula yang tidak menerima sama sekali. Hal ini kemudian menyebabkan ada warga yang kelaparan karena kekurangan makanan, sebagaimana beberapa kasus yang viral di media sosial.

Kasus serupa bukan hanya satu atau dua tapi juga banyak dijumpai di sekeliling kita. Sehingga himbauan untuk memberikan perhatian kepada tetangga dan orang terdekat sekitar lingkungan

rumah, kemudian hal ini menjadi gerakan spontanitas tanpa komando. Kebanyakan inisiatif, penggerak dan pelakunya adalah para perempuan-perempuan yang umumnya sebagai pegiat kemanusiaan, pekerja sosial, profesional, jurnalis, pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, ikatan alumni dan bahkan ibu rumah tangga.

Sebutlah beberapa kelompok yang terpantau dengan baik adalah upaya yang dilakukan oleh Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel yang beranggotakan kurang lebih 20 organisasi/ lembaga yang diinisiasi oleh beberapa mitra Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) melalui Program MAMPU dan AIPJ2, antara lain BaKTI, ICJ Makassar, KPI Sulsel, YKPM Sulsel dan DPW Aisyiyah Sulsel yang bekerja di wilayah Sulsel. Koalisi ini menggalang dana, bukan hanya dari internal koalisi yang terdiri dari Dewi Keadilan, LPA Sulsel, Fatayat NU, YASMIB Sulawesi, FPMP Sulsel, LSKP Sulsel, LBH Makassar, HWDI Sulsel, SPRT Parakatte, SPAK Sulsel, Gamasi FM, RAZ FM, Radar Selatan, PWKI Sulsel, FIK LSM. Namun juga menggalang dukungan dari pihak lainnya yaitu IOM Makassar, FPPM, Dharma Wanita, SPAK Indonesia dan individu yang memiliki kepedulian untuk turut serta memberikan dukungan.

Koalisi menyalurkan bantuan dalam dua tahap yaitu tahap pertama dalam bentuk penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis di beberapa Rumah Sakit Penyangga, mengingat ketersediaan APD sangat terbatas sedangkan Rumah Sakit tidak dapat menolak pasien yang datang berobat. Sedangkan tahap kedua, selain penyaluran APD ke Rumah Sakit juga pembagian bahan makanan (beras, gula, minyak dan lainnya) kepada keluarga-keluarga dampingan lembaga anggota koalisi yang dianggap paling membutuhkan.

Upaya kelompok lainnya adalah Komunitas Jurnalis Perempuan yang berupaya menyisihkan sedikit dari gajinya, atau upaya lainnya guna mengumpulkan sejumlah dana yang akan dikelola menjadi

nasi kotak, masker kain dan bantuan bahan makanan yang didistribusi ke pekerja informal antara lain tukang becak, tukang bentor, sopir angkot, buruh bangunan, tukang parkir dan keluarga miskin yang mereka temui dengan cara blusukan ke kantong-kantong pemukiman kumuh, miskin dan termarginal.

Berbagai cara dilakukan untuk membagikan sesegera mungkin, untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari dalam waktu sehari, dua hari atau beberapa hari. Ada yang langsung membagikan bantuan ke rumah-rumah, ada yang menggantungkan bantuan di pintu pagar dengan tulisan 'silahkan diambil', membagikan makanan siap santap, menitipkan sesuatu di etalase yang disediakan pihak tertentu, membagikan pelindung diri berupa masker, menyediakan air dan sabun cuci tangan di depan rumah dan berbagai cara dan bentuk berbagailainnya.

Resiliensi Perempuan

Riset membuktikan bahwa ketika perempuan dan laki-laki berada dalam situasi sama yang melibatkan sejumlah uang, perempuan cenderung lebih baik hati dalam membaginya daripada laki-laki. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal *Nature Human Behaviour*, adalah yang pertama menunjukkan kecenderungan biologis berbasis gender terhadap kemurahan hati. Namun, kata periset temuan tersebut tidak berarti bahwa satu gender tertentu terlahir untuk memberi lebih dari yang lain.

Faktor pendorong sebagaimana diuraikan di atas kemudian terinternalisasi dalam diri perempuan yang berdampak pada Resiliensi (ketahanan atau ketangguhan) perempuan. Resiliensi ini setidaknya dapat jelas terlihat pada beberapa aspek yang saat ini harus direspons dan dijalani oleh setiap orang atau keluarga.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Penggunaan Media Sosial untuk Advokasi

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

M

edia massa telah umum digunakan untuk memengaruhi dan mendorong perubahan kebijakan. Media mempunyai kekuatan dalam menggalang dukungan dan membentuk opini publik, untuk memengaruhi proses-proses yang terjadi di lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Kekuatan ini menempatkan media dalam posisi strategis dalam masyarakat dan negara. Suara dan kepentingan masyarakat dapat disampaikan melalui media, sementara kebijakan yang dibuat negara dapat diketahui dan dikontrol melalui media.

Namun media massa arus utama (*mainstream*) juga mempunyai agenda dan kepentingan sendiri, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik yang sangat beragam. Jurnalis atau wartawan memilih dan memilah peristiwa untuk memberitakan. Di samping itu, jurnalis juga mempunyai perspektif sendiri dalam melihat peristiwa, sehingga tidak semua peristiwa yang diliput dan diberitakan dapat memenuhi kepentingan publik.

Masyarakat rentan dan marginal tidak selalu mendapat liputan, dan jika menjadi pemberitaan pun, tidak selalu menguntungkan, bahkan tidak sedikit yang merugikan. Berita-berita bias dan menghukum ditemukan pada berita mengenai kemiskinan, perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok-kelompok minoritas dan marginal lainnya.

Pengalaman Komunitas

Kehadiran media sosial menjadi platform baru dalam memengaruhi dan mendorong perubahan kebijakan. Pengalaman Kelompok Konstituen, salah satu komunitas tingkat desa/kelurahan yang peduli terhadap hak-hak perempuan, dalam memanfaatkan Facebook dan Whatsapp untuk memengaruhi dan mendorong perubahan kebijakan, komunikasi, sharing pembelajaran, menempatkan media sosial sebagai ruang publik baru yang dapat diandalkan untuk kepentingan publik.

Kelompok Konstituen di wilayah perkotaan, yakni di Kota Kendari, Ambon, dan Parepare cukup efektif memanfaatkan Facebook dan Whatsapp, baik untuk berbagi informasi dan pembelajaran, maupun untuk memengaruhi proses-proses yang terjadi di berbagai lembaga. Kasus-kasus perempuan dan anak yang prosesnya mengalami hambatan di lembaga-lembaga hukum, biasanya menjadi perhatian setelah beritanya di media massa diunggah ke media sosial.

Ketua Kelompok Konstituen Flamboyan di Parepare, Naomi Sampeangin mengemukakan, banyak kasus perempuan, anak, disabilitas, dan

Di Ambon dan Kendari, media sosial Whatsapp efektif digunakan untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak. Beberapa kasus ditangani dengan cepat karena komunikasi di Whatsapp tanpa pertemuan tatap muka.

ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) muncul dan diketahui oleh kelompok konstituen atau pemerintah karena ada media sosial. Sebelumnya hanya wartawan yang memberitakan masalah-masalah tersebut, sehingga kalau kasus-kasus yang melibatkan orang-orang besar atau orang-orang berpengaruh pasti tidak diberitakan, tetapi sekarang makin banyak kasus yang terungkap karena kelompok konstituen menggunakan media sosial.

Apa yang dikemukakan oleh Naomi Sampeangin terkait dengan orang-orang besar atau orang-orang berpengaruh, selalu ada tiga kemungkinan yang terjadi. Pertama, media melihat sebagai momen penting dan berita penting hingga memberitakan secara berulang-ulang. Kedua, media tidak memberitakan karena pengaruh atau ancaman yang disebar oleh pihak yang terlibat. Ketiga, diberitakan dengan menampilkan berita yang menguntungkan pihak-pihak terlibat.

Media sosial dapat membuka ruang untuk kasus-kasus demikian, tentu dengan berbagai risiko yang juga dihadapi oleh pihak-pihak yang menyebarkannya. Karena itu, kelompok konstituen selalu diserukan untuk menggunakan media sosial secara bijak dengan hanya menggunakan untuk kepentingan bersama.

Di Ambon dan Kendari, media sosial Whatsapp efektif digunakan untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak. Beberapa kasus ditangani dengan cepat karena komunikasi di Whatsapp tanpa pertemuan tatap muka.

Kelompok Konstituen di Lombok Timur memanfaatkan Whatsapp dan Facebook untuk berbagi informasi dan menyampaikan berbagai permasalahan kepada pengambil kebijakan, terutama kepala desa, anggota BPD, anggota DPRD dan kepala dinas terkait.

Informasi dengan cepat disampaikan kepada pihak-pihak yang menangani kasus, sehingga dengan cepat ditangani tanpa publikasi yang merugikan korban maupun pelaku yang masih berumur anak-anak.

Tentu penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai permasalahan yang kadang menjadi bumerang dan merugikan, misalnya Kelompok Konstituen yang pernah mengunggah foto korban kekerasan seksual. Beberapa kasus yang kekerasan yang melibatkan anak-anak juga menjadi berita dengan identitas lengkap, termasuk dengan kronologis kejadian, karena disebar di grup media sosial. Beberapa foto korban dan pelaku anak yang berhadapan dengan hukum pun disebar di media sosial.

Media untuk Advokasi

Kelompok Konstituen memanfaatkan media sosial dengan baik untuk berbagai kegiatan, tidak hanya untuk kepentingan komunitas, tetapi juga untuk kepentingan kampanye, misalnya untuk calon kepala desa tertentu yang dianggap dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan di dalam perencanaan dan penganggaran desa. Media sosial Whatsapp cukup efektif digunakan dalam menggalang suara perempuan dalam pemilihan kepala desa, Ketua RT, Ketua RW, dan pemilihan umum.

Ketika pengurus Kelompok Konstituen di Parepare mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua RT dan RW, maka untuk mendukung pencalonan perempuan-perempuan yang berkompetisi dengan calon laki-laki, media sosial Whatsapp cukup efektif untuk menggalang suara perempuan untuk memilih perempuan.

Di Lombok Timur, Whatsapp dan Facebook digunakan Kelompok Konstituen untuk menggalang suara dalam

pemilihan kepala desa dan pemilihan umum. Kedua media sosial tersebut dimanfaatkan untuk menggalang suara perempuan untuk memenangkan kepala desa yang dianggap dapat membuat perencanaan dan penganggaran yang memihak pada kepentingan perempuan dan anak. Media sosial juga digunakan Kelompok Konstituen untuk mengkampanyekan calon legislatif perempuan.

Media sosial dapat digunakan untuk memengaruhi pembentukan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Data dan informasi yang dianggap penting diketahui oleh pembuat kebijakan, dibagikan di media sosial yang dapat diakses oleh pembuat kebijakan. Atau berita penting yang dimuat oleh media arus utama dalam bentuk cetak maupun *online*, oleh Kelompok Konstituen dibagikan di media sosial atau disampaikan langsung kepada pengambil kebijakan.

Kelompok Konstituen di Kendari menginformasikan kepada anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kendari mengenai penderita kanker payudara dan kanker serviks di beberapa kelurahan di Kota Kendari, yang tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh seorang anggota DPRD perempuan, informasi ini sampai kepada jurnalis dan akhirnya menjadi berita di media

arus utama. Kelompok Konstituen kemudian mengunggah berita dari media tersebut ke media sosial Facebook, akhirnya kemudian menjadi perhatian pihak BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Kota Kendari.

Di Parepare, penggunaan Facebook untuk advokasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan perubahan status Kantor Pemberdayaan Perempuan tidak hanya dilakukan oleh YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) dan Kelompok Konstituen, tetapi juga oleh masyarakat lainnya. Berita mengenai permasalahan BPJS dan dukungan anggota DPRD Parepare untuk alokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Parepare untuk BPJS Kesehatan dimuat oleh media cetak dan online di Parepare. Berita-berita tersebut juga diunggah di media sosial sehingga dengan mudah diketahui oleh anggota DPRD, Walikota, dan Dinas Kesehatan. Tahun 2016 Walikota Parepare dan DPRD Parepare setuju mengalokasikan anggaran untuk pembayaran BPJS masyarakat Parepare.

Demikian juga ketika DPRD Parepare membahas perubahan status Bagian Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Informasi yang diketahui oleh YLP2EM dan aktivis perempuan dan anak adalah Bagian Pemberdayaan Perempuan hanya akan menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan, yang artinya statusnya rendah dan tidak memadai untuk membuat kebijakan strategis untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini direspons oleh YLP2EM dengan membuat kertas posisi yang diserahkan kepada DPRD. Kertas posisi tersebut juga dimuat oleh Harian Pare Pos, yang kemudian dibagikan oleh Kelompok Konstituen dan aktivis perempuan dan anak. Akhirnya DPRD dan walikota sepakat meningkatkan status Bagian Pemberdayaan Perempuan menjadi DP3A.

Ketika pembahasan draf Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, beberapa anggota DPRD Ambon menyebut mereka memantau kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di media sosial yang dibagikan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang peduli anak dan perempuan. Yayasan Arika Mahina (YAM) dan Kelompok Konstituen di Kota Ambon aktif membagikan berita-berita mengenai kekerasan perempuan dan anak, sebagian berita tersebut langsung dikirimkan kepada anggota DPRD yang dikenal.

Kelompok Konstituen di Lombok Timur memanfaatkan Whatsapp dan Facebook untuk berbagi informasi dan menyampaikan berbagai permasalahan kepada pengambil kebijakan, terutama kepala desa, anggota BPD, anggota DPRD dan kepala dinas terkait. Kebijakan-kebijakan yang dibahas oleh pemerintah desa, seperti RPJM Desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, pembentukan Perdes (Peraturan Desa), diinformasikan di grup Whatsapp dan Facebook, sehingga masyarakat dapat mengikuti prosesnya, termasuk memberi masukan dan koreksi. Melalui media sosial juga, tim MAMPU-BaKTI NTB dan Kelompok Konstituen dapat memantau berita-berita mengenai perempuan dan anak, termasuk berita-berita yang merugikan perempuan dan anak.

Tentu pemanfaatan media sosial sebagaimana dikemukakan di atas bukanlah satu-satunya yang dapat memengaruhi atau mengubah kebijakan. Namun, apa yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen dalam memanfaatkan media sosial, untuk membagikan dan menyampaikan berbagai informasi penting kepada pihak-pihak yang membuat kebijakan, perlu diapresiasi, karena telah memanfaatkan media sosial untuk advokasi kepentingan umum.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Potret Pemberdayaan Perempuan Pedalaman Bahonglangi

BAGIAN II (Selesai)

Oleh
**WA ODE SURYA DARMA &
A. APPI PATONGAI**

Salah satu program utama 1000 Guru Sulawesi Selatan yaitu Pemberdayaan Perempuan di Pedalaman atau *Rural Women Empowerment (RWE)*, melaksanakan pendampingan kaum perempuan khususnya dalam bidang pendidikan mencakup kemampuan baca, tulis, dan hitung serta dalam bidang kewirausahaan di Bahonglangi, sebuah dusun di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.



Foto : Dok. 1000 Guru Sulsel

Program ini akan melalui beberapa fase pelaksanaan yaitu Fase Pengenalan Proyek *Rural Women Empowerment* dan mengurangi tingkat buta aksara di Bahonglangi khususnya untuk kaum perempuan, fase pelatihan manajemen keuangan keluarga dan keterampilan kewirausahaan bagi kaum perempuan Bahonglangi, fase pemasaran produk asli yang dikelola oleh kaum perempuan Bahonglangi, dan fase keempat mendorong terbentuknya kelompok usaha kecil yang melibatkan perempuan dan masyarakat Bahonglangi

Selain keempat fase tersebut, masyarakat Bahonglangi akan tetap mendapatkan

pendampingan oleh tim dalam mengaplikasikan keseluruhan hasil pelaksanaan proyek. Selain itu, tim akan melakukan komunikasi lewat telepon dengan peserta kegiatan dan pemerintah setempat terkait pelaksanaan proyek ini di Dusun Bahonglangi.

Pelaksanaan program ini akan melibatkan relawan dari Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Awalnya, setiap relawan akan berkontribusi secara finansial dalam membiayai seluruh akomodasi dan media pembelajaran dalam proyek. Di pertengahan 2018, proyek ini berhasil memenangkan hibah dari Konjen Australia melalui program *Direct Aid Program Australian Government*. Sehingga program ini dapat melakukan beberapa pengembangan dan melibatkan lebih banyak relawan untuk terlibat langsung.

Berdasarkan hasil *assessment* yang dilaksanakan di Dusun Bahonglangi sejak 2016, Dari 100 jumlah perempuan, yang menjadi sasaran pelaksanaan proyek ini adalah perempuan dewasa (18-45 tahun). Hampir seluruh dari perempuan di dusun ini mendapatkan beban ganda dalam keluarga, yaitu melakukan pekerjaan rumah dan umumnya ikut membantu suami di hutan, sawah maupun di kebun.

Diakhir September 2019, sebanyak 19 orang berhasil untuk melanjutkan ke kelas berikutnya dengan indikator mereka bisa membaca, menulis, dan berhitung. Pada fase kedua peserta mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan dan keterampilan kewirausahaan. Diawal pelaksanaan fase ini, mereka diminta untuk mengklasifikasi seluruh sumber penghasilan mereka dan alokasi pengeluaran mereka. Pelaksanaan fase ini dilakukan dengan memberikan contoh kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Setiap peserta diwajibkan mencatat seluruh transaksi keuangan keluarga dalam sebuah buku kas dan akan didiskusikan pada setiap sesi. Selain itu, ini peserta juga didorong untuk menggali potensi alam dan hasil pertanian mereka. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat potensi beras merah organik dan madu hutan. Maka dalam fase ini mereka juga mendapatkan beberapa keterampilan pengolahan beras merah

dan madu hutan. Mulai dari proses panen, pemilahan produk layak jual, pengemasan dan pemasaran. Mereka didampingi untuk melakukan *quality control* terhadap produk mereka sehingga seluruh produk yang mereka jual memiliki standar mutu yang sama.

Memasuki fase berikutnya, peserta didampingi untuk memulai melakukan pemasaran produk mereka yang telah dikemas dengan kemasan lebih baik. Pemasaran dilakukan di sekitar mereka dan di dibantu oleh tim untuk melakukan pemasaran produk di Makassar dan sekitarnya. Pada fase ini juga mereka telah mampu menjaga kualitas produk mereka dan siap untuk dipasarkan lebih luas. Peserta juga mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan *soft skill* mereka khususnya dalam berkomunikasi.

Berikutnya, peserta dibagi menjadi 4 kelompok usaha kecil yang akan mengolah hasil pertanian mereka berupa beras merah dan madu hutan. Setiap kelompok usaha melakukan pencatatan atas hasil produksi dan penjualan produk mereka. Anggota masing-masing kelompok didorong untuk melakukan kerjasama tim dalam meningkatkan penjualan mereka dan mengatur organisasi kelompok kecil mereka layaknya sebuah organisasi usaha. Produk masing-masing kelompok telah dipasarkan di Sulawesi Selatan bahkan telah sampai ke Pulau Jawa.

Selama proses ini dilaksanakan sebanyak 31 relawan yang konsisten untuk berkunjung dalam dua kali sebulan yang biasanya terdiri dari 3-6 orang dalam sekali kunjungan.

Selain kegiatan yang dilaksanakan di Bahonglangi, program ini juga melakukan beberapa kegiatan di Makassar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proyek di Bahonglangi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Proyek RWE kepada masyarakat luas sekaligus sebagai advokasi kegiatan. Selain itu, program ini memperkenalkan perempuan-perempuan Bahonglangi ke kabupaten dan mengundang mereka langsung untuk berbicara di depan dinas terkait.

Dalam pelaksanaan program ini, tim dan peserta dapat melihat serta merasakan perubahan yang sangat signifikan di Dusun Bahonglangi. Perubahan tersebut merupakan



capaian positif dari pelaksanaan proyek RWE ini. Beberapa capaian tersebut antara lain: Proyek RWE Bahonglangi berhasil mendorong keterlibatan kaum perempuan di Bahonglangi dalam memaksimalkan hasil pertanian beras merah organik dan madu hutan. Kini, masyarakat Bahonglangi mampu memasarkan produk mereka dengan harga yang jauh lebih bersaing. Selain itu program ini juga berhasil mengurangi tingkat buta aksara di Bahonglangi. Di akhir program, sebanyak 86 persen dari total peserta telah lancar menulis, membaca dan berhitung bahkan telah mengerti konsep manajemen keuangan keluarga. Mereka lalu mengajar masyarakat lain khususnya keluarga mereka sehingga dampak dari program ini bukan hanya mereka tapi seluruh masyarakat Bahonglangi, menariknya program ini juga mampu mengurangi tingkat putus sekolah dan pernikahan anak. Sebelumnya 95 persen anak yang lulus sekolah dasar di Bahonglangi tidak melanjutkan sekolah karena kesadaran warga akan pentingnya pendidikan sangat kurang. Sejak 2019, sebanyak 98 persen lulusan SD



Foto-foto : Dok. 1000 Guru Sulsel

melanjutkan sekolah mereka ke jenjang lebih tinggi. Hal ini juga mengurangi tingkat pernikahan usia dini di Bahonglangi yang sangat tinggi, karena mereka yang putus sekolah akan dinikahkan lebih cepat oleh orang tua mereka. Proses mediasi masyarakat Bahonglangi dengan pemerintah desa hingga tingkat kabupaten berhasil dilakukan. Hal tersebut dilihat dari perhatian pemerintah terhadap Dusun Bahonglangi semakin baik. Untuk pertama kalinya Dinas Kesehatan Kabupaten Bone mengunjungi Dusun Bahonglangi dalam Program Puskesmas Keliling pada bulan September 2018. Bupati Kabupaten Bone akhirnya menyempatkan untuk hadir dan bersosialisasi dengan masyarakat Bahonglangi. Bantuan dana sosial untuk masyarakat Bahonglangi lebih banyak dan merata, selain itu sejak proyek ini dilaksanakan, masyarakat Bahonglangi kini terbiasa memeriksakan kesehatan mereka ke Puskesmas terdekat. Hal yang paling menarik adalah mereka berhasil melaksanakan pengajian mingguan untuk melatih mengaji dan berbagi nasihat atau

ceramah. Hal ini mengasah kemampuan komunikasi mereka dan menjadikan para perempuan ini senantiasa selalu solid.

Dari pelaksanaan program ini, secara pribadi penulis ingin menyampaikan bahwa perempuan yang hidup di pedalaman memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh UN Women watch Organization, *“Rural women play a key role in supporting their households and communities in achieving food and nutrition security, and improving rural livelihoods and overall well-being.”*

Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengenal potensi diri dan lingkungan dan ditambahkan dengan asupan pendidikan lokal yang sesuai dengan situasi mereka, tidak hanya meningkatkan pendapatan atau mata pencaharian namun juga kesejahteraannya yang berkesinambungan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program 1000 Guru Sulsel, dapat menghubungi waode_suryauk@yahoo.co.id



Foto: KITLV

Jejak Peradaban Perempuan Adonara Dulu dan Sekarang

Oleh **EDUARDUS BAYO SILI**

Perbincangan tentang perempuan pada umumnya memang selalu menarik perhatian publik. Kata “Perempuan Adonara” tentu memiliki idiom tersendiri. Terkait dengan itu, ada beberapa pertanyaan yang patut diajukan. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan perempuan Adonara dengan perempuan pada umumnya? Pertanyaan tersebut sekaligus menegaskan apa sesungguhnya prinsip peradaban perempuan Adonara itu dibanding dengan perempuan yang bukan Adonara? Pertanyaan kedua, kondisi faktual seperti apa yang dialami perempuan Adonara dulu dan sekarang? Dan pertanyaan ketiga, seperti apa peradaban perempuan Adonara yang bermartabat yang diharapkan

oleh semua elemen masyarakat Adonara pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya? Tulisan ini mencoba menguraikan tiga pertanyaan tersebut diatas sebagai bahan perenungan kita semua dalam menyikapi jejak peradaban perempuan Adonara dulu dan sekarang.

Peradaban Bertumbuh dari Kebudayaan dan Modernitas

Apa yang dimaksudkan dengan peradaban itu? Peradaban adalah kumpulan suatu identitas terluas dari seluruh hasil budaya manusia, yang mencakup seluruh aspek hidup manusia, baik fisik seperti bangunan, jalan, maupun non fisik seperti nilai, tatanan, seni budaya, ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi yg teridentifikasi melalui unsur obyektif umum, seperti bahasa, sejarah.

Uraian tersebut setidaknya menggambarkan bahwa peradaban adalah bagian dari budaya yang halus, indah, maju dan tinggi. Selain itu dapat dimaknai juga bahwa peradaban bertumbuh dari budaya (tradisi) dan kehidupan modern. Peradaban dengan demikian berada diantara dua kutub yakni kebudayaan dan modernitas yang pada gilirannya menghasilkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Itu sebabnya diskusi tentang peradaban perempuan Adonara, hemat saya harus diawali dengan pertanyaan apa saja prinsip dasar yang menjadi pijakan kita dalam menelusuri jejak peradaban dimaksud. Tanpa itu, kita akan kehilangan arah, yang pada akhirnya kita terjebak dalam hutan rimba pendapat yang kita lontarkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tidak punya panduan dalam membangun dan menganalisis sebuah realita sosial yang hendak kita tuju.

Beberapa Prinsip Peradaban Perempuan Adonara

Berbicara tentang prinsip peradaban perempuan Adonara, tentu sangat banyak. Saya coba mengangkat beberapa diantaranya sebagai bahan kajian dalam tulisan ini.

1 Urusan doa adat secara khusus di rumah adat dengan sebutan doa adat *di rie hikung liman wanan (bau lolon)* menjadi hak atau domain *amalake* atau kaum laki-laki Adonara. Apa yang menjadi domain dari kaum laki-laki (*amalake*) Adonara menandakan bahwa perempuan atau *inawae* Adonara tidak punya otoritas melakukan ritual doa adat Adonara dalam bentuk *bau lolon* dalam upacara adat *di rie hikun liman wanan*. Kondisi seperti ini tidak berarti menyepelkan hak perempuan Adonara.

2 Perempuan Adonara tidak memiliki hak waris atas tanah tetapi memiliki hak waris berupa emas dan kala *kwatek*. Apakah ini sebuah ketidakadilan? Saya yakin tidak demikian adanya, karena pengaturan yang demikian pada zaman dahulu oleh kaka ama atau para leluhur (nenek moyang) kita, tentu dengan pertimbangan filosofis secara mendalam atau bahkan pertimbangan secara spiritual. Bagi orang Adonara, kepemilikan hak atas tanah secara adat berkaitan atau berhubungan dengan penguasaan wilayah teritorial secara hukum bagi *hak uma lango* (rumah adat), suku dan *lewo* (kampung adat).

3 Perempuan *neket tane, amalake mang kwanang* (perempuan menenun, laki-laki berkebun). Kita sangat paham bahwa filosofi ini lahir pada jaman masyarakat agraris. Apa yang bisa kita maknai pada jaman *now*? Saya memaknai bahwa adanya pembagian peran dari perempuan Adonara dengan laki-laki Adonara. Pembagian peran ini menunjukkan sinergi antara perempuan dan laki-laki sebagai rekan sekerja dalam membangun kehidupan manusia Adonara secara berkeadilan.

4 Kekerabatan Patrilineal (garis turunan laki-laki/*amalake*). Prinsip ini menggambarkan bahwa garis keturunan mengikuti keturunan *amalake*/laki-laki. Ini bukan menandakan bahwa perempuan Adonara tidak dihargai. Sejatinya perempuan Adonara itu sangat



dihargai sebagaimana terlihat dari adanya ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat Adonara. Misalnya dalam upacara adat “*tuno wata*” di wilayah Barat Adonara. Pada ritual tersebut pihak perempuan menjadi “ratu” dan pihak laki-laki menjadi “pelayan”. Mulai saat membeli barang keperluan di pasar dilakukan oleh laki-laki dengan berjalan kaki. Memasak juga laki-laki, bahkan saat makan juga perempuan harus lebih dulu makan dan laki-laki harus melayani perempuan. Di Wilayah Timur dikenal dengan “*oiknirek*”. Keekerabatan patrilineal ini tidak sama dengan budaya patriarki. Karena budaya patriarki adalah budaya yang memosisikan kekuasaan mutlak berada di tangan ayah atau laki-laki.

5

Perempuan Adonara *weling witi noon bala* (mempunyai belis gading gajah dan binatang kambing

bertanduk panjang). Saya dapat memaknai bahwa *weling witi noon bala* berarti bahwa perempuan Adonara adalah perempuan dengan posisi yang sangat terhormat, berharga, keramat (*plate-plate*) dan *powerful*. Saya dapat memaknai filosofi terhormat ini dengan menghubungkan makna tanduk kambing (*tarang*) bagi masyarakat Adonara bermakna mahkota. Filosofi atau makna keberhargaan, saya kaitkan dengan gading gajah (*bala*). Kiranya sangat tepat ungkapan yang mengatakan bahwa “Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik.” Filosofi keramat saya kaitkan filosofi binatang kambing bagi orang Adonara dalam prosesi adat adalah binatang sakral atau istilah orang Adonara dinamakan binatang plating. Filosofi *powerfull* atau sangat kuat (*kuat kemuha*) saya kaitkan dengan filosofi binatang gajah yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa atau *powerfull*.



Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Kondisi Faktual Peradaban Perempuan Adonara

Perempuan Adonara juga mewarisi peradaban yang lahir dari tradisi budaya dan dunia modern yang sedang dihadapi saat ini. Ada beberapa kondisi faktual yang dapat saya potret untuk kita renungkan bersama.

Masih adanya pandangan, meskipun tidak banyak yang menyatakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Jumlah sarjana perempuan Adonara masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah sarjana laki-laki Adonara. Perlu adanya komitmen yang kuat dari setiap perempuan Adonara untuk memajukan diri pribadi khususnya dalam bidang pendidikan.

Menariknya tidak ada hambatan budaya sedikitpun bagi perempuan Adonara untuk berkiprah dalam berbagai area kehidupan. Artinya bahwa terbukanya kesempatan yang

Perempuan Adonara dan laki-laki Adonara (*amalake*) adalah rekan kerja dalam menata kehidupan yang lebih baik (*amalake mang kewanang perempuan neket tane*).

Rekan sekerja artinya masing-masing pihak menempatkan diri sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki untuk saling mendukung, membangun sebuah kehidupan yang lebih sejahtera.

luas bagi perempuan Adonara untuk berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau kita mengenal pada jaman sebelum kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami masa gelap dimana perempuan dipingit dan tidak punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Maka di Adonara, tidak ada catatan kelam bahwa perempuan Adonara dilarang dan dipingit sebagaimana yang pernah terjadi di zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka.

Saya berharap momentum yang sangat berharga ini, harus dimanfaatkan dengan baik oleh perempuan Adonara dalam mengembangkan dirinya terlebih secara personal untuk menghadapi tantangan global yang ada di depan mata.

Peradaban Perempuan Adonara yang Bermartabat

Peradaban dibangun dari tradisi dan modernitas. Itu sebabnya kedua kekuatan ini, mau tidak mau saling memengaruhi. Karena itu meskipun dunia modern sangat memengaruhi perempuan pada umumnya termasuk perempuan Adonara, namun tradisi dan budaya yang baik, harus tetap dipelihara di tengah perubahan dunia ini.

Perempuan Adonara harus mampu menghayati dan memaknai mahar perkawinan gading gajah dan binatang kambing bertanduk



Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

panjang (*weling witi noon bala*) sebagai prinsip terhormat, berharga, keramat (*plate-plate*) dan *powerfull* (*kuat kemuha*) sebagai spirit untuk berperan di era modern ini. Spirit ini harus mengakar kuat dalam sanubari perempuan Adonara. Menjaga martabat perempuan Adonara secara terhormat dengan perilaku yang santun, tegur sapa dengan ciri khas Adonara. Martabat berharga bukan berbicara tentang “mahalnya” tapi esensi dari kualitas hidup manusia pada umumnya dan perempuan Adonara pada khususnya dalam merespon pergaulan sosial. Keramat (*plate-plate*) bermakna bahwa jika persoalan perempuan Adonara ini tidak diatur dengan baik maka dapat menimbulkan malapetaka.

Melalui penghayatan dan pengejawantahan prinsip-prinsip di atas, saya percaya dan yakin bahwa pandangan negatif terhadap perempuan Adonara dengan sendirinya akan hilang. Bahkan sebaliknya, orang semakin mengagumi perempuan Adonara karena mereka melihat perempuan Adonara memiliki prinsip-prinsip kehidupan yang berakar kuat dalam budaya Adonara di tengah dunia modern ini.

Perempuan Adonara dan laki-laki Adonara (*amalake*) adalah rekan kerja dalam menata kehidupan yang lebih baik (*amalake mang kewanang perempuan neket tane*). Rekan sekerja artinya masing-masing pihak menempatkan diri sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya untuk saling mendukung, membangun sebuah kehidupan yang lebih sejahtera. Fungsi dan kewenangan ini bisa dipahami dengan baik manakala kedua belah pihak menghayati prinsip-prinsip sebagai perempuan Adonara dan tentu pihak laki-laki (*amalake*) juga memahami dan menghayati dengan dengan baik fungsi dan kewenangnya sebagai *amalake* Adonara. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas meskipun tidak diuraikan secara khusus tentang prinsip *amalake* Adonara tapi secara tersirat fungsi dan kewenangan itu bisa ditemukan. Salam *Lewotannah*.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis berasal dari Lewo Kenotan di Kecamatan Adonara Tengah, kelahiran di Lewo Lamalouk, Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mataram di Mataram Lombok NTB. WA: 083129373376. Email: eduardbayosili@yahoo.co.id



info.bangga.papua.go.id

Sekarang Kitong Su Punya Muara Informasi tentang BANGGA Papua

Oleh
**LUNA VIDYA &
SYAIFULLAH**

Program BANGGA Papua yang telah berjalan dua tahun, di tiga kabupaten uji coba, memiliki sejumlah informasi tentang berbagai aspek program, dalam berbagai bentuk. Sebutlah sebuah kegiatan, maka ada beberapa jenis informasi yang terhimpun dari kegiatan itu saja. Misalnya, pelaksanaan pelatihan komunikasi persuasif di Lanny Jaya, tersimpan dalam berbagai bentuk rekaman peristiwa: artikel, foto dan tentu saja pelaporan. Itu jejak perekaman informasi standar. Di luar tiga hal standar tersebut, ada materi sosialisasi, ada juga video yang diproduksi dengan tujuan mempromosikan BANGGA Papua kepada khalayak ramai.

Di sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah berlangsung 22 aktivitas yang melibatkan 314 peserta terkait dengan peningkatan keterampilan komunikasi. Ada komponen pelatihan untuk memperkuat manajemen organisasi seperti pelatihan monitoring dan evaluasi. Ada pelatihan untuk pengelolaan data penerima manfaat, sehingga kabupaten dapat mengoperasikan sistem informasi yang dibangun untuk BANGGA Papua. Dalam perjalanan dua tahun program itu, juga ada sejumlah rapat koordinasi, yang pelaporannya dapat menggambarkan proses dinamis BANGGA Papua, sebagai sebuah organisasi kerja lintas sektoral OPD di Provinsi Papua, maupun di kabupaten uji coba. Sungguh sebuah galeri informasi yang terserak, beragam dan berharga, untuk menjadi pembelajaran bukan hanya untuk provinsi Papua, tapi bagi semua.

Rintisan *website* BANGGA Papua sebagai kanal informasi dimulai sejak akhir 2019 lewat sebuah *website dummy*. Rintisan ini kemudian ditindaklanjuti lewat sebuah pertemuan bersama Dinas Kominfo Provinsi Papua pada tanggal 2 April 2020. Dari pertemuan ini disepakati beberapa aspek teknis yang kemudian jadi landasan untuk membangun sebuah *website* informasi yang beralamat di bawah *website* pemerintah Papua, tepatnya di: <https://info.bangga.papua.go.id>. Proses pembuatan *website* ini melalui sebuah proses konsultasi dengan Sekber Provinsi Papua dan mitra pembangunan lain seperti KOMPAK, MAHKOTA dan UNICEF, lewat beberapa pertemuan dan koordinasi secara daring.

Website tersebut kemudian secara resmi diperkenalkan kepada semua pemangku kepentingan dalam program BANGGA Papua pada tanggal 11 Juni 2020.

Pada kesempatan peluncuran *Website* BANGGA Papua yang dipimpin oleh Ketua Sekber Provinsi BANGGA Papua, Andri Damir, hadir secara daring anggota Sekber Provinsi dan Koordinator Wilayah kabupaten (korwil): perwakilan Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai, Asmat serta Lanny Jaya, dan juga perwakilan dari mitra pembangunan KOMPAK dan MAHKOTA serta Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia.

Arti Penting Website BANGGA Papua

Pentingnya kehadiran *website* BANGGA Papua bagi program adalah karena *website* ini merupakan rujukan resmi berbagai informasi terkait BANGGA Papua. Di dalamnya terekam kegiatan-kegiatan BANGGA Papua beserta hasil dari kegiatan itu. Dari rekaman berbagai kegiatan ini, dapat dilihat bagaimana BANGGA Papua bergulir dari sebuah gagasan menjadi program inisiatif perlindungan sosial Pemerintah Provinsi Papua, dengan dana Otonomi Khusus sebagai sumber pendanaan.

Website ini juga menjadi tempat menyimpan pembelajaran tentang praktik baik BANGGA Papua. Apa saja yang telah dilakukan dan siapa yang telah terlibat. Meskipun pembelajaran praktik baik ini terkumpul dari tiga kabupaten uji coba, informasi praktik baik ini disadari seharusnya menjadi sesuatu yang tersedia bagi semua. Tidak hanya tersedia, tapi dapat dipertukarkan di antara Sekretariat Bersama (Sekber) BANGGA Papua kabupaten uji coba. Apa yang menjadi tantangan dan bagaimana tantangan itu diatasi oleh salah satu kabupaten, dapat menjadi informasi dan strategi bagi kabupaten lain. Sebagai inisiator program, seluruh informasi ini pun menjadi bagian dari galeri informasi Sekber BANGGA Papua provinsi yang dapat disampaikan dan dipertukarkan dengan pihak-pihak lain, baik kepada kabupaten dan provinsi lainnya, maupun kepada pemerintah pusat. Menjadi wadah pertukaran informasi adalah arti penting lain dari kehadiran *website* BANGGA Papua.

Di atas, disebut arti penting *website* BANGGA Papua. Pertama sebagai rujukan resmi program. Kedua, tempat mengamati perkembangan dan menandai pencapaian program. Ketiga, tempat mempelajari praktik baik program. Keempat, menjadi wadah pertukaran informasi. Selain ke empat hal tersebut, signifikansi kehadiran *website* BANGGA Papua yang lain adalah menjadi tempat merujuk penanganan hoaks.

“Kita berharap *website* ini bukan hanya sebagai tempat berbagai informasi, tapi juga bisa jadi rujukan untuk menangkal hoaks,” kata Merlyn Hamadi, Sekretaris Sekber Provinsi BANGGA Papua dalam kesempatan pelatihan

website BANGGA Papua, yang dilakukan secara daring tanggal 7 Juli 2020.

Hoaks adalah hal yang tidak terhindari sejak awal implementasi BANGGA Papua. Kenapa demikian? Karena Program ini memiliki keunikan, ketidaklaziman sebagai program “perlindungan sosial” yang sedang berjalan di kabupaten kota Provinsi Papua, bahkan untuk Indonesia. Keunikan itu antara lain, NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai syarat utama untuk menjadi penerima manfaat serta mekanisme transfer dana ke rekening Bank Papua atas nama ibu/wali yang sah. Kedua hal ini membuat kebiasaan penerimaan dana oleh kepala kampung atau kepala keluarga (baca: laki-laki) misalnya, tidak berlaku.

Beberapa kasus munculnya berita dan cerita hoaks tentang BANGGA Papua sudah terjadi di lapangan. Beberapa berita yang salah bahkan sudah mulai terasa mengganggu pelaksanaan program BANGGA Papua, minimal dari sisi psikologis. Beruntung karena Sekber BANGGA Papua di tingkat kabupaten berhasil menangani hoaks tersebut dengan baik. Selanjutnya, kehadiran *website* BANGGA Papua ini diharapkan bisa menjadi rujukan untuk menangkal hoaks atau misinformasi yang mungkin beredar.

Tujuan menjadi wadah informasi ini, tentu saja berarti apa yang termuat di dalam *website* ini, dapat diakses dan diambil manfaatnya oleh pihak di luar Sekber. *Website* ini, adalah “muara informasi” tentang Program BANGGA Papua yang tersedia bagi semua. Ke dalam muara informasi ini, perlu diperhitungkan ragam pengetahuan yang bersumber dari keunikan konteks lokal masing-masing kabupaten ketika mengimplementasikan BANGGA Papua.

Bukan saja “muara informasi”, *Website* BANGGA Papua juga jadi alat bukti, bentuk lain akuntabilitas sosial program kepada masyarakat Papua, baik bagi yang telah menjadi penerima manfaat maupun yang belum.

Rancangan Mekanisme Pemutakhiran

Dalam rancangan kegunaan sebagai rujukan resmi informasi tentang BANGGA Papua, wadah pertukaran informasi dan merekam rantai

perkembangan kegiatan serta pencapaian, *website* ini dipersiapkan untuk menjadi catatan berkelanjutan program yang pemutakhiran informasinya, bersumber terutama dari kabupaten. Pemikiran ini menghasilkan pembagian teknis suplai informasi akan diisi oleh kontributor dan editor dari Sekber Kabupaten dengan kendali admin pada Sekber Provinsi. Tetap tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga peran kontributor dan editor di Sekber Provinsi.

Dengan rancangan pemutakhiran ini, maka keberlanjutan *website* akan menjadi peran yang harus dimainkan oleh Sekber Kabupaten dan Sekber Provinsi bersama-sama.

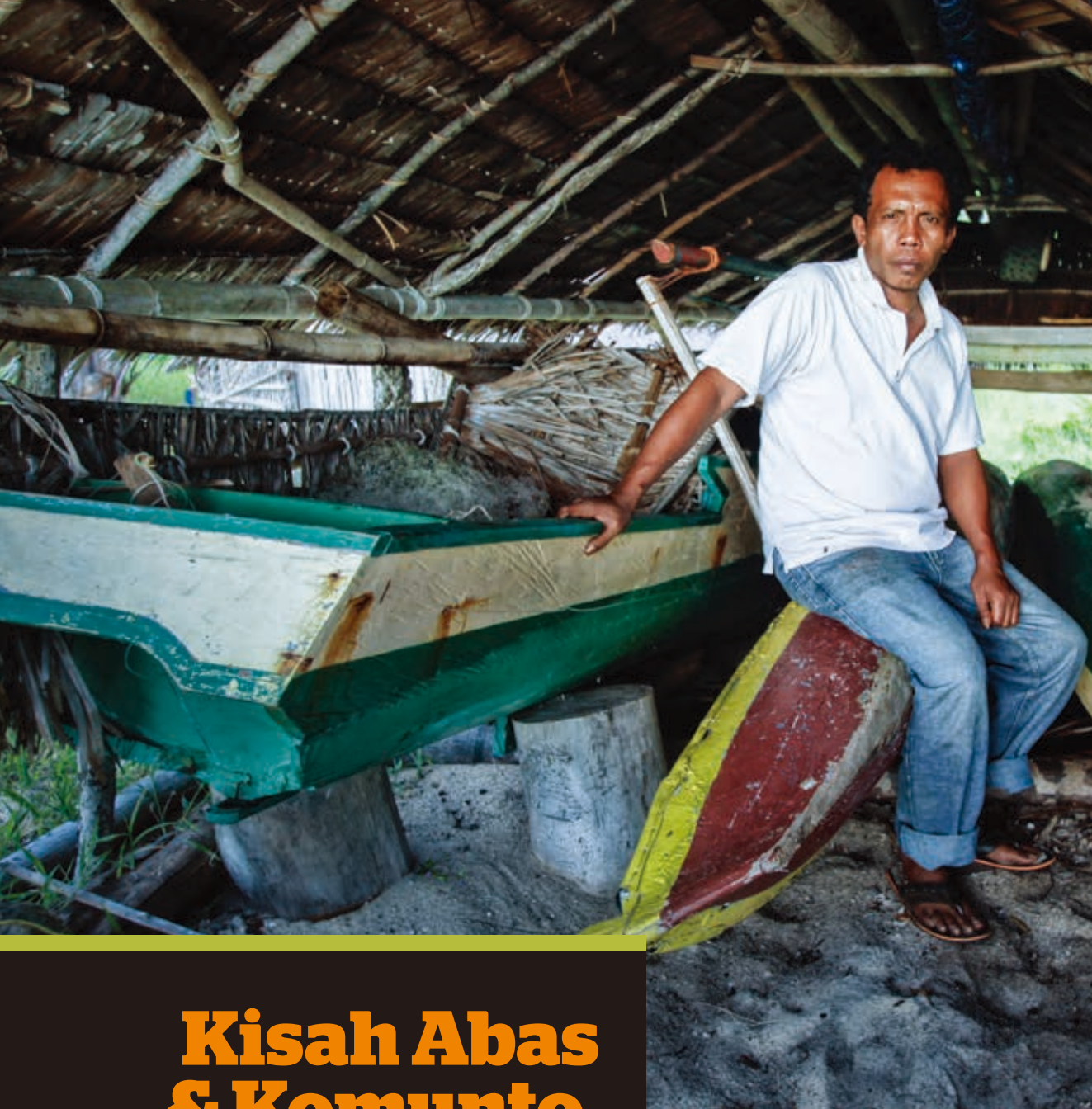
BANGGA Papua perlu waktu tunggu untuk melihat dampaknya. Benih pengetahuan bagi keluarga dan bantuan untuk kesehatan dan gizi anak Papua membutuhkan waktu 20 tahun untuk dapat dilihat sebagai ladang yang siap dipanen dan dinikmati. Perlu waktu untuk generasi emas Papua terwujud. Berapa lama pun waktu itu, *website* ini sejak peluncurannya adalah sebuah muara asal yang merekam perjalanan, pembelajaran dan manfaat yang diberikan BANGGA Papua kepada Papua. Muara di mana anak-anak yang hari ini berusia 4 tahun ke bawah, kita saksikan berlayar ke masa depan.

“*Website* Ini adalah bagian dari sosialisasi. Kita membagikan apa yang telah kita hasilkan ke publik. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk membagikan pengetahuan yang kita miliki. Walaupun dengan keterbatasan karena pandemi COVID-19, kita masih bisa melakukan langkah-langkah besar untuk program yang kontekstual Papua,” kata Andri Damir, Ketua Sekber Provinsi BANGGA Papua dalam sambutannya saat pelatihan *website* BANGGA Papua, 7 Juli 2020.

Bayangkan masa depan dengan generasi emas dan bagaimana rekam ragam cerita baik pelaksanaan BANGGA Papua yang sedang dikerjakan saat ini, mewarnai masa depan itu.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua dapat menghubungi info@bakti.or.id



Kisah Abas & Komunto, Nelayan Tomia yang Menjaga Laut dengan Hati

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Saya Abas, saya nelayan. Saya tinggal di pulau Tomia. Tomia adalah salah satu pulau di gugusan kepulauan Wakatobi. Kabupaten Wakatobi adalah kabupaten maritim yang menjadi salah satu cagar biosfer dunia dan salah satu cagar alam taman laut. Wakatobi juga merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Indonesia.



Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Abas, salah satu pendiri Komunto (Komunitas Nelayan Tomia). Foto : Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Kami merasa kondisi ini tidak akan mensejahterakan kami sebagai nelayan. Ini malah akan membunuh kami karena kegiatan penangkapan yang tidak beraturan itu merusak sumber mata pencaharian di komunitas kami, di komunitas nelayan Tomia.

Saya dan beberapa teman-teman termasuk bapak tua kemudian waktu itu berinisiatif, masalah ini tidak boleh dibiarkan. Kami mulai prosesnya. Kami berjalan dari desa ke desa dari tempat yang sepi ke tempat yang ramai. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan pengorganisasian nelayan, karena nelayan yang paling terdampak dengan ramainya aktivitas tangkap yang luar biasa sehingga terjadi *destructive fishing*, tangkapan berlebihan yang kemudian dibuang ke laut. Bukan lagi memberi manfaat tapi yang terjadi adalah pencemaran kepada laut. Kami tidak boleh membiarkannya, ini daerah kami, laut kami. Kami yang akan merasakan sendiri akibatnya.

Maka mulailah kami melakukan pengorganisasiannya. Teman-teman nelayan dari desa kami rekrut, kami sampaikan bahwa kita harus memperkuat diri. Kami membuat kelompok-kelompok di setiap desa. Dalam satu desa ada 1 hingga 3 kelompok yang terus berjalan sampai dengan tahun 2005. Hingga tahun 2006 sebanyak 28 kelompok terbentuk termasuk kelompok perempuan yang terdiri dari ibu-ibu pengolah hasil laut dari hasil tangkapan suaminya.

Kami butuh waktu 3 tahun untuk membentuk kelompok, yang kini dikenal dengan Komunto (Komunitas Nelayan Tomia). Yang membuat kami berbeda dengan organisasi lain adalah kami menyematkan organisasi kami sebagai organisasi rakyat. Proses lahir kami tidak dari atas tapi dari bawah, dari rakyat. Ketika pemahaman bersama bahwa kepentingan kita harus diperjuangkan terkait kondisi laut Tomia, kami waktu itu menuntut agar negara harus adil, negara tidak boleh memberikan izin menangkap

Saya ingat di tahun 2004 boleh dikata Wakatobi adalah daerah dengan open akses. Semua orang boleh datang menangkap dengan alat tangkap apa saja, ilegal maupun legal. Semua bisa datang mengeruk, memancing dengan cara mereka sendiri. Tidak ada batasan ataupun aturan. Di tahun 2004 itu Wakatobi belum mekar sebagai kabupaten, kami masih bergabung dengan Buton sehingga penanganan terhadap tata cara penangkapan ilegal masih sangat lemah karena belum ada regulasi yang jelas.



untuk semua dan itu dimungkinkan melalui berkelompok.

Tahun 2005 kami sudah membuat bank ikan sebelum organisasi Komunto berdiri oleh beberapa kelompok di wilayah itu. Proses pembentukan bank ikan dengan pengetahuan kami nelayan yang terbatas itu tidak mudah. Bukan persoalan area mana yang akan diproteksi tapi ini terkait kesadaran, apakah tujuan pembentukan bank ikan ini dipahami oleh nelayan?

Setelah kelompok terbentuk, kami bekerja sama dengan beberapa lembaga selain Pemda diantaranya adalah WWF, TNC serta Balai Taman Nasional. Waktu itu kami bilang ke mereka bahwa SDM kami ini tidak ada, kami hanya nelayan, kami tidak butuh bantuan berupa

jaring, alat tangkap atau kapal. Yang kami butuhkan pengetahuan dan ilmu.

Kami mengajukan permintaan pengembangan kapasitas kepada lembaga mitra secara lisan, karena kami tidak punya kemampuan menuliskannya dalam bentuk proposal. Pelatihan berlangsung kurang lebih tiga tahun bahkan sampai sekarang. Pelatihan ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bergabung dalam komunitas, karena mereka merasa dengan bergabung mereka dapat ilmu.

Sebelum areal ditetapkan sebagai bank ikan, kami terlebih dahulu meminta kepada mitra kami untuk melakukan penelitian tentang tingkat kerusakan karang, kesehatan karang, populasi ikan dan jenis ikan yang pernah ada kemudian menghilang, bagaimana tingkat



aksesibilitas nelayan ke area itu. Tujuan penelitian ini adalah sebagai dasar untuk menetapkan area itu cocok atau tidak menjadi bank ikan.

Proses selanjutnya adalah kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dari penutupan area tertentu untuk penangkapan. Sebelum melakukan sosialisasi dan kampanye kami dilatih terkait analisis sosial. Aturan dalam bank ikan tidak ditetapkan oleh pengurus tapi ditetapkan oleh anggota komunitas sendiri melalui musyawarah.

Salah satu aturan dalam bank ikan yakni tidak boleh melakukan penangkapan pada waktu tertentu. Ada jadwal kapan wilayah ini buka dan kapan tutup sama sekali. Ditutup biasanya pada saat ikan sedang memijah untuk

berkembangbiak agar mereka bebas bertelur dan melepaskan telurnya untuk menjadi anak ikan.

Bank ikan tidak dipagari oleh kawat atau tembok besi tapi oleh kesadaran bersama. Kesadaran ini dibangun cukup lama, sekitar dua tahun. Dari tidak tahu menjadi tahu. Kami mengingatkan bahwa ini adalah sumber mata pencaharian yang harus dilindungi.

Kami bekerja sama dengan taman nasional khususnya seksi 3. Kami meringankan beban kerja mereka karena jika sebelumnya mereka harus mengamankan sendiri area ini, kini masyarakat berpartisipasi mengamankan dalam membantu pengawasan dan menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya.

Jika benteng atau pagar kesadaran masyarakat ada yang rusak sehingga terjadi



pelanggaran dalam wilayah bank ikan, sepanjang tidak dalam ranah kriminal seperti pengeboman, penggunaan racun atau potasium maka akan kami selesaikan berdasarkan pada kearifan masyarakat setempat. Kami beranggapan bahwa kami sama-sama nelayan yang sedang mencari makan di laut, maka ada tetua kampung yang akan menyelesaikan dengan memberi penyadaran kembali bahwa pembatasan dalam bank ikan adalah untuk kebaikan nelayan dan laut sendiri.

Dampak setelah bank ikan ini ada untuk lingkungan bukan hanya terhadap laut, seperti karang semakin bagus pertumbuhannya, populasi ikan-ikan semakin banyak, semakin beraneka ragam, tetapi lingkungan sekitarnya juga ikut terjaga. Pasir pantai kami semakin bagus, hutan di pantai semakin baik.

Sekitar tahun 2004 kami susah mendapatkan ikan di perairan dekat kampung. Kami melaut sangat jauh, waktu melaut menjadi lebih lama. Dulu biasanya kami pulang dengan tangan kosong. Tetapi ketika semua terlindungi di bank ikan, ikan memijah dengan baik tidak terganggu, karang sehat, populasi ikan semakin banyak. Kami tidak lagi jauh-jauh mencari ikan, kami melaut di sekitar-sekitar bank ikan saja. Keinginan kami para nelayan bahwa harus punya tangkapan untuk dibawa pulang pun terjawab.

Secara organisasi kami ingin tetap eksis, tetap berbuat untuk kepentingan banyak orang dan negara. Cita-cita besar kami saat ini adalah mendampingi dan menguatkan tetua adat Tomia secara kelembagaan. Kami melihat bahwa salah satu yang harus kami kuatkan adalah masyarakat



hukum adat utamanya yang berhubungan dengan konservasi dan pelestarian sumber daya alam.

Pada lokasi-lokasi bank ikan, kami akan melakukan monitoring secara berkala tentang tingkat kesehatan terumbu karang dan populasi ikan. Hal ini akan kami dorong untuk dilakukan bekerjasama dengan siapapun. Kami akan menciptakan fasilitator perikanan swadaya yang ada di setiap desa. Karena desalah yang menciptakan data bank khususnya di lokasi-lokasi bank ikan. Banyak pelabuhan tradisional kecil yang belum terdata, intinya kami ingin membantu pemerintah melakukan pendataan terhadap hasil tangkapan di setiap desa dan melakukan juga penyadartahuan kepada masyarakat.

Untuk semua nelayan di Indonesia, saya hanya bisa berpesan bahwa nelayan adalah pekerjaan mulia. Jika negara benar-benar memperhatikan kehidupan nelayan dan potensi perikanan kita yang besar dikelola dengan baik maka ini merupakan potensi devisa besar bagi negara yang berasal dari tangan-tangan keriput nelayan. Bagi saya pekerjaan nelayan adalah pekerjaan yang sangat keren dan mulia.

Foto-foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas ini, Anda dapat menghubungi email: info@bakti.or.id



RESPONS DAERAH UNTUK
TATANAN BARU:
**Dampak COVID-19
di Bone
Sulawesi Selatan**

Oleh **TIM PENELITI TULODO**



Petugas dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bone, melakukan *rapid test* di eks pasar sentral watampone.

Foto : www.bonepos.com/Herman

C OVID-19 adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada akhir 2019. Sebulan kemudian WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi.

Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, 335 desa, dengan Watampone sebagai ibukotanya. Jumlah penduduk di Bone adalah 751.026 orang. Seperti juga banyak daerah di Indonesia, Kabupaten Bone juga telah terlibat secara aktif dalam usaha pencegahan COVID-19. Sejak 15 Mei 2020, sebanyak 21.249 orang telah mengikuti tes dan terdapat enam kasus positif

COVID-19 juga telah memberikan dampak pada kehidupan masyarakat seperti sekitar separuh responden mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekitar 16% kehilangan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat juga takut terinfeksi (68,3%) dan merasa stres atau marah (35,0%).

yang dikonfirmasi. Sebanyak 14 pasien dalam perawatan (PDP); 9.796 orang dalam pemantauan (ODP); dan 310 orang dalam risiko (ODR).

Pada April 2020, Tulodo melakukan penelitian guna bertujuan untuk menjawab pertanyaan seputar apa dampak COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu? Penelitian ini menggali bagaimana masyarakat di Bone menanggapi situasi COVID-19, termasuk di dalamnya adalah perubahan perilaku kesehatan seperti pemakaian masker wajah, praktik mencuci tangan dengan sabun, dan perilaku menjaga jarak, dan bagaimana pandemi ini dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi mereka. Kami juga menggali lebih dalam tentang penggunaan saluran komunikasi serta informasi terkait COVID-19 oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode potong lintang (*cross-sectional*) dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, yang dilakukan setiap minggu dari 23 April hingga 15 Mei 2020. Hal ini memungkinkan kami untuk menelusuri data dari minggu ke minggu selama masa penelitian. Survei kuantitatif dilakukan melalui telepon dan *online*. Tulodo menggunakan metode bola salju untuk merekrut peserta melalui telepon, sementara untuk daring kami mendistribusikannya melalui mitra Tulodo. Target total sampel adalah sebanyak 450 responden, 360 responden berhasil dihubungi melalui telepon dan mengisi survei *online*. Untuk survei kualitatif, kami melakukan sebanyak 15 wawancara melalui telepon.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku terkait kesehatan selama pandemi COVID-19. Lebih dari 90% masyarakat telah mempraktikkan penggunaan masker wajah dan cuci tangan. Masyarakat juga telah mempraktikkan pembatasan jarak sosial dan lebih banyak orang tinggal di rumah pada minggu terakhir pengumpulan data.

Di sisi lain, COVID-19 juga telah memberikan dampak pada kehidupan masyarakat seperti sekitar separuh responden mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekitar 16% kehilangan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat juga takut terinfeksi (68,3%) dan merasa stres atau marah (35,0%). Saat ini, negara-negara termasuk Indonesia sedang bersiap untuk transisi menuju kondisi normal baru di mana kehidupan sosial dan ekonomi dapat berfungsi kembali. Kesiapan dari pemerintah dan seluruh masyarakat akan menjadi penting. Masyarakat perlu dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk menyesuaikan dengan normal baru.

Fokus Pada Pembatasan Jarak

Kebijakan pembatasan jarak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi mobilisasi masyarakat di Indonesia. Ketika kebijakan pembatasan jarak mulai dikurangi, masyarakat perlu tetap diedukasi tentang bagaimana terus mempraktikkan pembatasan jarak pada masa normal baru. Penekanan harus pada tetap tinggal di rumah sesering mungkin, termasuk memberikan insentif ekonomi, seperti subsidi upah dan makanan, serta disinsentif, seperti denda dan peringatan untuk mereka yang melanggar peraturan atau kebijakan bagi kondisi normal baru seperti memakai masker wajah dan mempraktikkan pembatasan jarak.

Dukungan Bagi yang Mengalami Penurunan Pendapatan dan Kehilangan Pekerjaan

COVID-19 telah berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat dan status pekerjaan, dengan demikian penting untuk mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah ini dalam situasi normal yang baru. Program seperti KUBE, PKH, Rastras, KIS dan lain-lain perlu diperkuat. Dukungan, termasuk proyek padat karya dan kredit mikro, harus

diberikan melalui komunitas masyarakat seperti. PKK, BKMT, kelompok tani dan nelayan. Selain itu perlu juga mengidentifikasi siapa sasaran yang tepat untuk penerima manfaat. Penting juga untuk mengkomunikasikan bagaimana sistem atau mekanisme penyaluran dukungan sosial ini kepada masyarakat untuk menghindari kesenjangan sosial.

Menargetkan Kelompok Lansia

Hampir setengah dari responden melaporkan setidaknya ada seorang responden berusia di atas 60 tahun yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian penting untuk mempertimbangkan saluran komunikasi yang tepat dan materi yang menargetkan orang lanjut usia karena mereka lebih rentan terhadap COVID-19. Media tradisional seperti televisi dan radio surat kabar masih merupakan saluran yang tepat untuk menyasar kelompok lansia di Indonesia. Dalam situasi COVID-19 ini, media ini menjadi saluran penting. Anggota keluarga yang lain juga dapat bertindak sebagai saluran penting untuk menyampaikan informasi kepada para lansia sehingga informasi dapat disalurkan secara akurat dan efektif.

Mengurangi Stigma Sosial dan Meningkatkan Kesehatan Mental

Stigma sosial yang timbul selama COVID-19 perlu dikurangi terutama dalam situasi normal baru. Sebagaimana ada beberapa kasus positif di Bone, kita perlu memahami bahwa mereka yang tidak memiliki penyakit tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan mereka yang dikonfirmasi dengan COVID-19 (misalnya tinggal di lokasi yang sama dengan pasien COVID-19) kemungkinan besar akan mengalami stigma sosial. Ada kebutuhan untuk mendidik masyarakat tentang cara mengurangi stigma sosial. Pemerintah nasional dan daerah perlu mendidik masyarakat tentang COVID-19 dan penularannya untuk mengurangi stigma sosial ini. Mekanisme untuk meningkatkan kesehatan mental di masyarakat dan individu perlu ditingkatkan, termasuk sistem rujukan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai laporan ini dapat mengunjungi *website* www.tulodo.com

Menghadapi Normal Baru, Puskesmas Sebenarnya Bisa Lebih Perkasa Memberdayakan Masyarakat

Oleh **MARYA YENITA SITOANG & HADIYANTO**

Setelah tiga bulan berupaya mengendalikan penularan wabah COVID-19 melalui karantina wilayah, pemerintah Indonesia akhirnya memilih kembali menjalankan roda perekonomian yang sempat lesu, termasuk membuka tempat ibadah dan mal.

Pemerintah mengkampanyekan normal baru. Istilah ini merujuk pada sebuah tatanan baru yang menganjurkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang lebih ketat untuk masyarakat dan fasilitas umum guna mencegah penularan Virus Corona.

Pemberlakuan normal baru di sini mengundang risiko lebih besar karena Organisasi Kesehatan Dunia menganjurkan penerapan normal baru dilakukan di suatu negara jika sudah tidak ditemukan kasus baru di negara tersebut.

Faktanya, kasus COVID-19 di Indonesia belum pernah melandai sejak ditemukannya kasus pertama di awal Maret 2020. Dalam sebulan terakhir, setelah pertemuan massal orang dalam kaitan perayaan Hari Raya Idul Fitri, jumlah kasus baru harian COVID-19 di Indonesia justru cenderung melebihi 1000 kasus.

Hal itu tampaknya dipicu oleh maraknya kerumunan masyarakat baik sengaja atau tidak sengaja karena mereka mendatangi pasar untuk berbelanja baju atau perlengkapan sebelum Lebaran, beribadah bersama dan silaturahmi dengan keluarga.

Masalah serius yang kurang disadari adalah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia belum didesain untuk menghadapi sebuah bencana kesehatan. Apalagi



bencana penyakit yang dahsyat, penularannya cepat dan belum ada vaksin dan obatnya seperti COVID-19.

Keadaan ini berbeda dengan negara lain seperti Korea Selatan, Jerman dan Inggris yang sudah mematangkan sistem pelayanan kesehatannya sejak lama, sehingga mereka lebih mampu menghadapi lonjakan pasien COVID-19 dalam waktu singkat.

Sebenarnya, Indonesia yang memiliki hampir 10.000 Puskesmas, namun sekitar 30% di antaranya berada di Pulau Jawa, bisa memperkuat kapasitasnya untuk menghadapi pandemi yang belum pasti kapan berakhirnya.

Masalah Puskesmas

Dalam sistem kesehatan di Indonesia, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan institusi terdepan tingkat pertama pelayanan kesehatan di akar rumput. Mereka melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dan perorangan dengan lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif.

Petugas kesehatan di layanan kesehatan ini paling dekat dengan masyarakat, termasuk memiliki program pengembangan yang melibatkan peran masyarakat melalui keberadaan kader kesehatan. Bersama kader kesehatan, upaya edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan

Puskesmas Kaliwungu Kudus ditutup sementara pada awal Mei 2020 setelah enam tenaga kesehatan di sana terkonfirmasi positif COVID-19.

Foto : ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho

COVID-19 dapat menggunakan cara-cara yang lebih sesuai dengan budaya dan bahasa masyarakat setempat, bukan dengan bahasa “langit” yang sering digunakan pemerintah.

Sayangnya, program sosialisasi dan kader kesehatan di Puskesmas sering tidak maksimal pelaksanaannya karena hanya bertujuan untuk menyelesaikan program, bukan pada perubahan perilaku masyarakat agar lebih sehat.

Selain itu, kondisi dan kemampuan Puskesmas di Indonesia berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung dari kapasitas dan manajemen masing-masing Puskesmas. Ketimpangan sumber daya manusia, akses informasi serta infrastruktur memengaruhi kinerja Puskesmas dalam melaksanakan upaya menyehatkan masyarakat.

Dalam suatu diskusi pada April 2020, yang diadakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI dalam rangka kegiatan riset yang sedang berlangsung, seorang tenaga kesehatan di Wakatobi mengatakan pada masa-masa awal pandemi COVID-19 petugas Puskesmas di sana belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk

disebarkan ke masyarakat guna mencegah COVID-19.

Selain karena banyaknya perubahan informasi pada awal pandemi COVID-19, menurut keterangan dari tenaga kesehatan tersebut, paparan informasi terkait COVID-19 pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa, khususnya di Wakatobi, memang cenderung kurang masif.

Beralih Dari Sisi Kuratif

Dalam pandemi COVID-19, Puskesmas mempunyai peran yang sangat penting mulai dari promotif, preventif, kuratif sampai rehabilitatif.

Promotif: melakukan berbagai pendekatan ke masyarakat agar masyarakat mengerti tanda, gejala serta bahaya dari COVID-19.

Preventif: menskrining COVID-19 di wilayah kerjanya dengan bekerja sama dengan dokter praktik/klinik/bidan praktik. Mereka juga perlu memantau orang-orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.

Kuratif: mengobati pasien OTG, ODP dan PDP dengan gejala ringan sehingga mereka dapat sembuh tanpa harus ke rumah sakit.

Rehabilitatif: memberikan konseling ke keluarga dan lingkungan di dekat penderita COVID agar tidak mengucilkan pasien COVID 19, sebaliknya memberi dukungan pada pasien COVID-19 dan keluarganya.

Selain Puskesmas, terdapat fasilitas kesehatan (faskes) swasta yang 'lebih dipercaya' masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan yaitu klinik pratama dan bidan praktik setempat. Meski faskes tersebut lebih fokus pada pengobatan, Puskesmas dapat berkoordinasi dengan faskes swasta untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait protokol kesehatan pada masa normal baru COVID-19 ini.

Jika sebuah Puskesmas menjalankan upaya promotif dan preventif dengan menyesuaikan pada budaya yang dimiliki masyarakat setempat, Puskesmas akan memiliki 'ikatan yang kuat' dengan masyarakat dan mampu memobilisasi masyarakat untuk menerapkan perilaku sehat.

Bagaimana pun, protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun serta makan makanan

bergizi dan berolah raga teratur akan memiliki manfaat besar jika dilaksanakan secara massal.

Peran Masyarakat

Bukan hanya pada petugas kesehatan, sesungguhnya garda terdepan upaya meningkatkan kesehatan secara umum, tidak hanya dalam konteks mengendalikan COVID-19, terletak di pundak masyarakat.

Pendekatan yang tepat pada masyarakat sebagai garda terdepan pencegahan COVID-19 sangat penting mengingat sistem pelayanan kesehatan Indonesia masih belum mampu menampung pasien yang terus meningkat baik karena COVID-19 maupun akibat penyakit lainnya.

Karena itu, pencegahan penularan di tingkat masyarakat sangat penting untuk mengurangi beban pengobatan di rumah sakit. Fasilitas kesehatan (rumah sakit) yang lengkap alat dan tenaga kesehatannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu rasio dokter per penduduk di Indonesia masih rendah, yakni empat dokter di bertanggung jawab menangani 10.000 penduduk (4:10.000).

Rekomendasi

Meski mengubah perilaku masyarakat bukan perkara mudah, Puskesmas memiliki posisi strategis di masyarakat dan otoritas kesehatan yang seharusnya mampu meyakinkan masyarakat untuk berupaya mencegah COVID-19.

Kerja sama yang erat antara Puskesmas dan masyarakat akan meningkatkan kepatuhan pada protokol kesehatan serta mengurangi hambatan dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang berasal dari masyarakat.

Pada masa pandemi ini dan ke depan, Puskesmas dapat bekerja sama dengan klinik pratama, bidan dan dokter praktik di wilayah kerjanya untuk menghimpun kekuatan mewujudkan perilaku kesehatan masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis:

Marya Yenita Sitohang

Researcher in Research Center for Population, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Hadiyanto

Dokter/Dosen, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Artikel ini bersumber dari:

<https://theconversation.com/menghadapi-normal-baru-puskesmas-sebenarnya-bisa-lebih-perkasa-memberdayakan-masyarakat-140709>

MENGHARAP KENORMALAN BARU DAN KERENTANAN DI MASYARAKAT

Oleh **NOPITRI WAHYUNI**



lorifikasi wacana *new normal* atau kenormalan baru tengah dikritik habis-habisan lantaran relaksasi pembatasan sosial justru berbanding lurus dengan peningkatan kasus. Sejak dilontarkan pada tanggal 15 Mei lalu, skema simulasi kenormalan baru berangsur-angsur dilaksanakan sejak awal bulan Juni dan direncanakan berakhir pada akhir bulan Juli. Persis tanggal 5 Juni, Pemerintah DKI Jakarta pun menangkap pesan penerapan kenormalan baru melalui relaksasi pembatasan sosial yang ditelurkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi. Selain itu, terdapat tiga provinsi lainnya, yakni Sumatera Barat, Jawa Barat dan Gorontalo, serta 25 kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan ini.

Belum genap seminggu peraturan transisi, yang lebih tepatnya upaya pelonggaran tersebut diterapkan, angka kasus bergerak dinamis bahkan melonjak. Tanggal 9 dan 10 Juni lalu, misalnya. Angka penambahan kasus terkonfirmasi positif *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) harian mencapai 1,042 dan 1,241 kasus. Dari angka tersebut, 239 kasus yang bertambah pada tanggal 9 Juni lalu ialah angka yang berasal dari DKI Jakarta. Jelas saja, hal ini merupakan konsekuensi yang muncul ketika upaya memulihkan ekonomi berarti membuka kembali aktivitas industri, gedung-gedung perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan, dan juga moda-moda mobilitas manusia.

Konsekuensi seperti ini pun mengejutkan banyak negara. Tengok Korea Selatan, China, Jerman maupun Italia. Selang beberapa hari

ketika wacana kenormalan baru diterapkan di negara-negara tersebut, kenaikan kasus COVID-19 tak bisa dielakkan. Di Korea Selatan, angka kasus harian mencapai 56 kasus baru per tanggal 11 Juni dan puncaknya pernah mencapai 76 kasus per hari pada tanggal 27 Mei. Di Italia, angka kasus harian mencapai 379 kasus per tanggal 11 Juni ketika sehari sebelumnya 202 kasus. Di Jerman tak kalah sama, pada tanggal 11 Juni, angka kasus mencapai 555 kasus ketika sehari sebelumnya mencapai 308 kasus (Kompas, 12/6).

Lonjakan kasus yang berasal dari DKI Jakarta sebenarnya menjadi alarm peringatan. Maksud hati ingin berdamai dengan virus sekalipun menggunakan protokol kesehatan, banyak risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat ketika kembali ke kantor maupun pada sektor informal dengan upah harian yang harus beraktivitas di luar rumah. Risiko kerentanan fisik tersebut juga didasarkan pada peta sebaran COVID-19 memasukkan usia 31-59 tahun sebagai kategori usia yang paling rentan terinfeksi oleh virus, serta berbagai kondisi penyerta yang menghinggapi pasien terkonfirmasi positif. Sebab, mereka pun tergolong masuk ke usia produktif yang menjadi salah satu motor pemulihan ekonomi itu sendiri.

Pernyataan Presiden Joko Widodo pada saat pembukaan daerah-daerah yang bersiap menerapkan adaptasi kebiasaan baru pada Rabu lalu (12/6) sebenarnya menjadi tantangan tersendiri. Beliau mengungkapkan bahwa ancaman gelombang kedua penyebaran virus wajib diantisipasi. Sayangnya, pernyataan ini justru banyak dikecam lantaran penanganan COVID-19 masih bolong di sana-sini, bahkan ketika wacana penerapan kenormalan baru terdengar semakin keras. Apalagi, relaksasi yang tengah berjalan masih belum sejalan dengan data faktual tentang kasus dan realitas kesiapan dan ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan.

Pemerintah Indonesia juga geger dengan sebuah publikasi dari *Deep Knowledge Group* (2020), yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling tidak aman ke-4 dari 100 negara yang dianalisis dari aspek keamanan dan keselamatan terhadap penyebaran virus dan stabilitas pemulihan jangka panjang. Indikator yang dilihat ialah efisiensi proses karantina,

monitoring dan deteksi, kapasitas kesehatan dan efisiensi pada sisi pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 kekeh bahwa segala keputusan terkait dengan penanganan COVID-19 sudah berbasis konteks karakteristik daerah-daerah di Indonesia, termasuk penentuan zona-zona maupun penggunaan data. Namun, apakah cukup sampai di situ?

Dilema Mengharap Kenormalan Baru

Saat ini, dipastikan sebagian besar masyarakat kembali beraktivitas untuk mengais pendapatan mereka setelah kurang lebih tiga bulan menjalani pembatasan sosial skala besar. DKI Jakarta, tetap sebagai permisalan. Kantor-kantor beroperasi kembali dan ruang-ruang kerja dipenuhi lagi dengan “janji” anjuran untuk menerapkan protokol kesehatan di sana-sini. Di berbagai daerah, zona-zona hijau dan kuning pun dipublikasikan untuk menyiratkan bahwa semua tengah bersiap-siap untuk benar-benar berdamai dengan COVID-19 dan beraktivitas kembali.

Namun, kritik tetap tak bisa dinihilkan. Masalahnya, pertimbangan untuk memulai wacana ini masih berbenturan dengan berbagai prasyarat yang ditetapkan secara kesehatan. Pertama, tren kelandaian kasus di Indonesia belum dapat terlihat. Hal ini tentu sangat berbeda dengan negara-negara yang sudah memulai kenormalan baru seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Perhitungan tentang berbagai zona hijau dan kuning yang dilihat dengan adanya penurunan maupun nol kasus pun belum disertai dengan tes COVID-19 yang memadai. Perlu dicatat, per tanggal 12 Juni, angka *rapid test* di Indonesia masih berkisar 1,752 tes per 1 juta orang dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta penduduk saat ini.

Belum lagi soal kapasitas kesehatan maupun sistem kesehatan. Di Jakarta dan Surabaya, yang sebenarnya lebih siap secara kapasitas kesehatan, tetap kewalahan dalam segi penanganan. Dilansir dari Inge Dhamanti (2020) yang ditulis di *The Conversation*, lonjakan kasus mengakibatkan fasilitas kesehatan babak belur menyediakan sarana dan prasarana dan manajemen pelayanan kepada pasien. Lagi-lagi, perbedaan tingkat kesiapan rumah sakit, fasilitas

kesehatan dan sumber daya kesehatan lainnya, serta pengetahuan tenaga kesehatan mengenai protokol COVID-19 yang berbeda-beda di setiap daerah juga menantang kesiapan untuk menanggung lebih banyak risiko munculnya kasus baru pada situasi kenormalan baru.

Pertimbangan signifikan lainnya adalah upaya minimalisir kasus dan pencegahan. Pertama, berbasis catatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), upaya mengurangi risiko penyebaran dapat dilakukan di wilayah-wilayah padat penduduk, rumah lansia maupun fasilitas kesehatan mental. Dengan adanya relaksasi bertahap saat ini, upaya penanganan virus tentunya akan lebih sulit dilakukan karena risiko penyebaran telah terurai bersamaan dengan tingginya tingkat mobilitas manusia sekaligus rendahnya upaya pencegahan di wilayah-wilayah dengan kerentanan tinggi.

Kedua, upaya pencegahan di tempat kerja. Kebijakan PSBB transisi di DKI Jakarta dapat dilihat sebagai gambaran apakah protokol kesehatan yang terang benderang yang menyebutkan aturan kapasitas maksimal karyawan yang bekerja di kantor dan pergantian jam kerja, telah diterapkan oleh perusahaan maupun institusi terkait. Padahal, pengawasan ketat pada ketentuan ini juga dapat membantu untuk menekan kepadatan mobilitas manusia saat relaksasi diberlakukan.

Terakhir, menyoal kesadaran masyarakat untuk berkomitmen pada protokol kesehatan. Tantangan di sini, perbedaan konteks kelompok masyarakat tentu akan memengaruhi bagaimana penerimaan mereka terhadap anjuran mengenai protokol kesehatan. Di sisi lainnya, melihat konteks tersebut juga berarti melihat situasi ketimpangan risiko di masyarakat. Realitasnya, sebagian besar masyarakat harus pelan-pelan menghidupi diri dan pada saat yang sama, tetap harus berjaga diri atas kemungkinan risiko-risiko yang menghampiri. Hal ini sungguh membutuhkan upaya yang tak sedikit, apalagi ketika semua mau tak mau menanggung risiko untuk produktif kembali.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Artikel ini bersumber dari <https://www.theindonesianinstitute.com/mengharap-kenormalan-baru-dan-kerentanan-di-masyarakat/>

Bumi yang Berbela Rasa

Wawancara dengan

Ibu ERNA WITOELAR

Dewan Pembina Yayasan BaKTI

COVID-19 telah membuat masyarakat dan seluruh dunia menghadapi musuh yang sama yaitu Coronavirus Disease 2019. Berbagai negara menerapkan kebijakan untuk membatasi aktifitas di luar rumah hingga kebijakan bekerja dan sekolah dari rumah pun diterapkan. Karena pembatasan ini, banyak orang yang mengurangi frekuensi perjalanan. Di beberapa kota-kota besar, untuk beberapa waktu jalanan sepi dan akhirnya berdampak pada pengurangan polusi. Ibu Erna Witoelar, Dewan Pembina Yayasan BaKTI dan Menteri Perbukitan dan Pengembangan Wilayah pada Kabinet Persatuan Nasional, Ibu Erna akan berbagi pengalaman yang sekian lama berkecimpung di isu lingkungan, beliau juga akan berbagi gagasan dan pandangan beliau dampak pandemi COVID-19 terhadap kelanjutan bumi.

Menurut Ibu, Pandemi COVID-19 menimbulkan apa buat bumi ini?

Pandemi ini sebenarnya datang secara tiba-tiba dan kemudian secara cepat melanda semua orang dan hampir seluruh negara di bumi entah sampai kapan. Di awal saya gamang, kemudian beralih sedih dan dan berduka karena begitu banyak korban di dunia dan di Indonesia. Hingga suatu waktu, saya sampai pada pemikiran ada hikmah dari pandemi ini. Ternyata udara menjadi lebih bersih, orang betah tinggal di rumah lebih lama, ada yang kemudian menjadi guru buat anak, buat cucunya. Kemudian bisa melakukan banyak hal, menemukan banyak cara untuk dapat betah di rumah. Tidak ada pilihan lain selain kita harus mematuhi kebijakan tersebut. Kebijakan *Work from Home* ternyata pekerjaan tidak berkurang malah bertambah. Ada plus dan minus pandemi ini.

Ada anggapan bahwa, ini saatnya bumi sedang beristirahat. Menurut Ibu, apakah bumi betul-betul beristirahat saat ini?

Di Kawasan Timur Indonesia telah mengenai sistem sasi, membuat laut beristirahat untuk waktu tertentu dan

ikannya bertambah dan nelayan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Saat ini dunia, sedang di sasi oleh Tuhan. Tuhan menyuruh manusia untuk menghentikan sementara aktifitasnya, tidak membuang emisi, dan kita bisa berhemat dengan kreatif memanfaatkan yang ada di sekitar kita untuk tetap beraktifitas. Kita juga lebih bisa mengendalikan konsumsi kita agar tidak berlebihan. Sehingga manusia memiliki kesadaran masing-masing tanpa harus dikomando.

Tindakan apa yang dikerjakan untuk dapat mempertahankan situasi ini, walau pandemi ini telah berakhir nanti?

Memang pandemi ini akan berakhir, tapi kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Sehingga ada suatu keadaan *The New Normal* yang akan beda dengan keadaan normal kemarin. Kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini dan merancang sendiri penyesuaian diri masing-masing. Sekarang kita patut bersyukur bahwa semua agama progresif menanggapi pandemi ini, untuk membatasi aktifitas beribadah di tempat ibadah. Karena dipelopori oleh tokoh agama maka orang-orang mampu menerima dengan lebih tenang sekaligus menjadi bahan introspeksi bagi pribadi masing-masing, merenung kembali bahwa mungkin kehidupan kita sebelumnya banyak yang berlebihan.

Menurut Ibu, dengan segenap upaya dan kebijakan yang telah diterapkan apakah sudah cukup untuk ke depan?

Menarik, dengan adanya pandemi ini tiba-tiba menyadari tidak ada satupun orang, pihak yang paling berkuasa dalam menangani pandemi ini. Banyak desentralisasi kekuasaan yang harus dilakukan dari daerah, pemimpin daerah sehingga kekuasaan menjadi terbagi. Kita juga tidak bisa menunggu pemerintah, filantropi juga kian berkembang, dana yang digalang oleh orang biasa dan jangkauannya ke seluruh pelosok, solidaritas dan

kedermawanan, kepedulian meningkat dengan sangat tinggi. Tren ini tidak akan berhenti di tengah jalan, orang juga akan lebih berhati-hati untuk kembali ke zaman yang sebelumnya, merusak lingkungan, konsumsi berlebihan karena telah melihat sendiri korban yang tidak pandang bulu. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga.

Dalam keadaan seperti ini, kualitas kemanusiaan kita semakin muncul. Kesadaran mengenai lingkungan mampu menjadi milik bersama. Yang ibu maksud dengan menari di atas gendang sendiri seperti apa bu? Apakah seperti sasi, di mana kita bisa hidup selaras dengan alam?

Saya pernah beberapa kali protes dan menyatakan keprihatinan saya, kenapa tidak ada yang ribut tentang demam berdarah? padahal jumlah kematian dengan demam berdarah lebih tinggi. Kita di Indonesia Timur, lebih mendengar gendang nasional yang menyuarakan COVID-19 dibandingkan mencari solusi dan meredam demam berdarah. Yang perlu dilakukan, COVID-19 karena melibatkan secara nasional. Maka cara-cara komunikasi menjadi lebih kreatif. Informasi mengenai COVID-19 dibuat dalam berbagai bahasa di Indonesia dan semua media menginformasikan tentang COVID-19. Sehingga cepat sekali mencapai target orang yang ingin dituju.

Kita di Kawasan Timur Indonesia, mengapa kita tidak menabuh gendang sendiri dengan demam berdarah misalnya. Mengapa kita tidak bisa menggali kepedulian sesama tentang itu? Mengapa kita tidak bisa menggali informasi mengenai pencegahannya dengan cara-cara kreatif dan menjangkau lebih banyak orang. Kita menyuarakan ini dari KTI, tidak masalah apabila gaungnya masih terbatas di KTI tapi lama-kelamaan akan menjadi agenda nasional. Kita seolah-olah tidak berdaya padahal ini sama juga dengan penanganan COVID-19, tidak berempati. Ini semua hikmah dari COVID-19 kita bisa belajar dari segala aspek.

Mengenai pemeliharaan kesehatan, sesuatu yang mungkin dulu jarang kita lakukan. Kita harus olah raga untuk menjaga kebugaran tubuh tapi di sisi lain banyak tempat olah raga yang tutup. Sehingga kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus menjaga kesehatan secara mandiri.

Di tempat lain seperti yang daerah padat, akan sangat nampak pengurangan emisi karena pengurangan lalu lintas. Di laut kita pun nampak lebih bersih, terjadi penurunan drastis penangkapan ikan, kapal penangkap ikan, penurunan emisi dari kapal-kapal besar. Kita juga memiliki cara-cara pemeliharaan hutan, kita harus menggabungkan upaya pemerintah dengan upaya industry dengan melakukan moratorium terhadap pembabatan hutan. Sekarang yang telah ada, diharuskan untuk melakukan restorasi dan pada tempat dimana

mereka berproduksi, mereka harus melakukan optimalisasi pada produksinya jangan ke mana-mana lagi dan pemerintah harus tegas melarang. Jadi, kita tidak kembali lagi ke praktik-praktik merusak lingkungan, mencemari laut nanti akan ada pandemi berikutnya lagi. Kita harus menjaga bumi kita dan kita yang akan merasakan nikmatnya.

Seperti yang Ibu sampaikan, seperti kawasan industri di mana saat ini shut down karena pandemi. Apakah gagasan untuk dunia usaha seperti yang Ibu sampaikan, apakah bisa bertemu pada satu titik?

Ada yang ketemu, ada yang tidak. Tergantung dari pemiliknya apakah lebih mengejar untung, keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup dan sosial. Banyak contoh perusahaan di dunia yang bisa membuat itu lebih seimbang, mungkin saja dalam 5 – 10 tahun ke depan sudah tidak ada lagi industri pertambangan dan minyak. Sekarang yang menggunakan sumber daya alam harus berusaha merestorasi. Ada satu juga keuntungan COVID-19, air tanah mulai bertambah dan sungai-sungai menjadi lebih bersih. Ini dulu, susahny minta ampun untuk membuat seperti ini. Makanya, sekarang kita tidak boleh lagi mengotori sungai, laut. Pemerintah yang telah kewalahan menangani Corona ini harusnya lebih berhati-hati mengawasi proses ini.

Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dulu sistem sentralisasi Indonesia (*top down*), sekarang mau tidak mau kekuatan lebih terdesentralisasi ke masyarakat dan ada di daerah, Indonesia terlalu besar untuk ditangani secara sentralistik. Desentralisasi perlu dikawal oleh teman-teman, mulai dari Kawasan Timur Indonesia, mulai dari BaKTI, mulai dari teman-teman di BAPPEDA teman-teman peneliti mengambil permasalahan di tangan sendiri kemudian direbukkan dan diputuskan, ini akan berefleksi hingga ke nasional. BaKTI bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar, dengan aktifitas melakukan model-model pemberdayaan masyarakat, dengan keberagaman anggotanya mampu berbuat banyak. Saya optimis dan menganggap ini sebagai *blessing* ada hikmah bagi umat manusia.

Pertanyaannya sekarang, istirahatlah bumi karena pandemi? Bumi Berbela Rasa. Di Kawasan Timur Indonesia ada sasi, harus dijaga terus-menerus agar kita mendapatkan manfaatnya. Kita di Indonesia Timur punya kemampuan mengenali dan menangani persoalan-persoalan ini, kita punya tifa dan kita bisa memukul tifa, menari di atas gendang yang kita tabuh sendiri, untuk mengerti apa yang harus kita lakukan, untuk menyanyikan apa yang harus kita tanam ke depan, sebuah normal baru dihadapi, tapi karena kita berjejak di atas kaki sendiri, kita ada di sini karena memahami apa yang ada di sini, kita akan menjadi orang-orang yang keluar dari pandemi ini sebagai pemenang apa saja di masa depan. ■

Artikel

Meningkatkan Proses Berpikir Kreatif Siswa

Berpikir kreatif diperlukan dalam setiap kehidupan manusia terutama untuk memecahkan setiap masalah dan hambatan yang dialami di setiap jenjang kehidupan. Oleh karenanya, kemampuan untuk berpikir kreatif wajib diasah sejak di bangku sekolah.

Di sekolah, secara spesifik pelajaran kreatif memang tidak ada, tapi bukan berarti belajar untuk berpikir kreatif di setiap pelajaran tidak bisa. Kreatifitas tidak dibatasi hanya pada pelajaran seni saja seperti menggambar, musik atau pelajaran tari, tetapi semua pelajaran di sekolah bisa menjadi ajang kreatifitas siswa.

Misalnya dalam pelajaran sains, siswa bisa berpikir secara kreatif proyek-proyek sains yang ingin dilakukan, dalam pelajaran matematika, penerapan secara sederhana ilmu matematika dalam kehidupan membutuhkan proses berpikir kreatif, dalam bidang ilmu sosial kreatifitas banyak yang bisa dilakukan karena ilmu sosial belajar tentang hubungan antar manusia.

Untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif banyak cara yang bisa dilakukan di dalam kelas maupun di dalam lingkungan keluarga.

<https://batukarinfo.com/komunitas/articles/meningkatkan-proses-berpikir-kreatif-siswa>

Referensi

Mengubah Kebijakan Publik di Desa



Program MAMPU-Yayasan BaKTI mengembangkan Kelompok Konstituen di tingkat desa/kelurahan, sebagai organisasi masyarakat kritis dan berdaya di tingkat komunitas, untuk melakukan advokasi, termasuk untuk memengaruhi pembentukan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran di desa.

Pengalaman Kelompok Konstituen dan mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Belu, dan Kota Ambon, dalam melakukan advokasi yang fokus pada pembentukan Peraturan Desa (Perdes), perencanaan, penganggaran dituangkan dalam buku ini.

<https://batukarinfo.com/referensi/mengubah-kebijakan-publik-di-desa>

Peluang

Beasiswa Studi Singkat "Ketahanan Demokrasi-Partisipasi Generasi Muda dalam Demokrasi Indonesia"

Apakah Anda berminat mendorong partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi, dan berupaya menangkal misinformasi dan disinformasi? Australia Awards Indonesia mengundang Anda untuk mengikuti Beasiswa Studi Singkat "Ketahanan Demokrasi – Partisipasi Generasi Muda dalam Demokrasi Indonesia".

Studi singkat ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda; mendukung advokasi kebijakan dan mengembangkan strategi menangkal misinformasi dan disinformasi; dan meningkatkan keterampilan literasi politik dan media. Studi singkat ini merupakan beasiswa penuh. Perempuan dan penyandang disabilitas

<https://batukarinfo.com/news/applications-open-democratic-resilience-%E2%80%93-youth-participation-indonesia%E2%80%99s-democracy-short-term>

Berita

Pemerintah Memberikan Pedoman Kegiatan di Kantor Selama COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan pemerintah telah memberikan beberapa pedoman terkait bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor selama pandemi COVID-19. Dengan adanya sejumlah pedoman pemerintah tersebut, kata dia, diharapkan setiap individu yang bekerja di kantor tidak lagi menjalankan kegiatan sebagaimana paradigma normal sebelumnya, melainkan mengubahnya serta tetap waspada.

Pedoman yang diberikan tersebut mulai sejak berangkat dari rumah yakni dengan tetap menjalankan protokol kesehatan baik itu menggunakan masker, menjaga jarak fisik serta mencuci tangan. Kemudian di dalam perjalanan menuju kantor, khususnya bagi yang menggunakan transportasi umum, pemerintah telah membagi pelaksanaan kegiatan kantor dengan dua gelombang masuk yakni pertama pada pagi hari pukul 07.00 WIB atau 7.30 WIB dan kedua pada siang hari tepatnya pukul 10.00 WIB atau 10.30 WIB.

<https://batukarinfo.com/news/pemerintah-memberikan-pedoman-kegiatan-di-kantor-selama-covid-19>